



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kampung Baru, Pasar Kliwon, Surakarta



**KAJIAN STRATEGI PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN
PENGEMBANGAN DATA BERBASIS
KELUARGA DAN SPASIAL DI KELURAHAN**

2023

Pengarah : Agung Riyadi, S.Sos, S.H,M.M
(Kepala Balitbangda Kota Surakarta)
Penanggung Jawab : Gunawan Adi Pratio, S.T, M.T
(Kabid Penelitian dan Pengembangan)
Tim Penulis
Koordinator/Penulis : Herri Widiyanto, S.Sos, M.Si
Anggota/Penulis : Francisco Amaral, S.STP., M.Si
Budi Winarno, S.H., M.H.
Zelius Ragiliawan, S.E., MBA.
Zakaria, SE
Reni Andri Lestari, ST, MT
Lusia Sari Murniati, S.Kom, M.Eng

Editor : Zakaria, SE
Design/Layout : Gunawan Adi Pratio, ST, MT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2 ayat (1)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunianya buku laporan hasil **Kajian Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pengembangan Data Berbasis Keluarga Dan Spasial di Kelurahan** ini dapat diselesaikan. Buku laporan hasil kajian ini merupakan upaya optimalisasi peran dan fungsi Balitbangda Kota Surakarta sebagai unit penunjang dalam memberikan pertimbangan ilmiah atas persoalan strategis kota di bidang sosial dan kependudukan.

Hasil kajian ini bertujuan untuk memastikan rencana percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dapat berjalan dengan baik, dari sisi koordinasi, sinergitas dan pengendalian program agar pencapaian penurunan angka kemiskinan bisa optimal dan untuk melihat efektivitas dokumen kemiskinan baik yang berbasis keluarga maupun berbasis Spasial apakah sudah konsisten digunakan sebagai base line data perencanaan baik dalam menentukan kelompok sasaran

.Buku laporan hasil kajian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya partisipasi, kontribusi dan bantuan dari Narasumber, Tim Kajian, serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan buku laporan hasil Kajian Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pengembangan Data Berbasis Keluarga Dan Spasial di Kelurahan ini disampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi usaha kita dan memberikan keberkahan kepada kita semua.

Surakarta, November 2023

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SURAKARTA,



AGUNG RIYADI, S.Sos. SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721107 199303 1 004

KAJIAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN PENGEMBANGAN DATA BERBASIS KELUARGA DAN SPASIAL DI KELURAHAN

Tim Kajian

ABSTRAKSI

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga, sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2019-2022) terus mengalami kenaikan yaitu sebesar 8,7%, 9,03%, 9,4% dan 8,84

Dinamika Naik turunnya angka kemiskinan di kota Surakarta mengindikasikan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang masih sangat rentan terhadap perubahan sosial, ekonomi dan politik. Dibutuhkan upaya meletakkan proporsi yang benar tentang konsistensi antara Perencanaan, strategi, program, penentuan sasaran, mekanisme penyampaian atau pelembagaan dengan mengutamakan sinergi peran antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk kepentingan warga miskin.

Kajian ini bertujuan adalah 1) untuk memastikan rencana percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dapat berjalan dengan baik, dari sisi kordinasi, sinergitas dan pengendalian program agar pencapaian penurunan angka kemiskinan bisa optimal dan 2) untuk melihat efektivitas dokumen kemiskinan baik yang berbasis keluarga maupun berbasis Spasial apakah sudah konsisten digunakan sebagai base line data perencanaan baik dalam menentukan kelompok sasaran Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian adalah kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk merumuskan interpretasi menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan di Kota Surakarta beserta karakteristik yang menyertainya Kajian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan kota Surakarta.

Ada beberapa strategi dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surakarta sebagai berikut :

1. Strategi Membangun Sinergitas Antar Stake Holder Pembangunan
2. Strategi Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Model Intervensi
3. Strategi Koordinasi Dan Pengendalian Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
4. Strategi Mengukur Pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Periodik.

Dari Hasil Kajian Strategi Percepatan Penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan Data berbasis Keluarga dan Spasial di Kelurahan maka dapat disimpulkan:

1. Kinerja capaian pada tahun 2022 angka kemiskinan turun menjadi 8,84 % atau turun 0,56 % dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 9,04 %.
2. Kebijakan pemerintah kota Surakarta sudah tepat dengan melakukan pengembangan Data Kemiskinan lokal diluar data yang dikeluarkan oleh pemerintah Nasional. Kebijakan ini bisa mengurangi tingkat kekeliruan data yang dikeluarkan pemerintah pusat dan upaya ini akan mengurangi tingkat keparahan keluarga miskin dari keterpurukan
3. Proses penyisiran warga miskin dengan metologi AKP berbasis keluarga, mulai dari proses uji publik di tingkat RT, Musrenbang data di tingkat Kelurahan mampu melakukan penyisiran data untuk menentukan usulan siapa yang miskin dan tidak miskin

berdasarkan dari pengamatan masyarakat memotret keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasarnya

4. Data berbasis keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Kesejahteraan (e-sik) bisa digunakan sebagai acuan dalam menyusun analisis kemiskinan; diagnosis kemiskinan; dan menyusun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan; sekaligus bisa digunakan sebagai alat monitoring keberhasilan program Data berbasis Spasial atau Lingkungan, sudah di integrasikan dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sehingga akan menjadi landasan dasar proses musrenbang partisipatif sejak mulai dari Musyawarah lingkungan

Kaca Kunci: Kemiskinan, Spasial, Pengembangan Data

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAKSI	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum.....	I.4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I.7
1.4. Hasil yang Diharapkan	I.7
1.5. Ruang Lingkup.....	I.7
1.6. Metodologi	I.8
1.7. Sistematika Laporan Kajian	I.9
 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II.1
2.1. Aspek Geografis dan Demografis	II.1
2.2. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II.4
2.3. Aspek Kualitas dan Sumber Daya Manusia	II.15
 BAB III KONDISI KEMISKINAN DAERAH	III.1
3.1. Garis Kemiskinan	III.1
3.2. Persentase Penduduk Miskin	III.3
3.3. Jumlah Penduduk Miskin	III.5
3.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	III.6
3.5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	III.7
 BAB IV TINJAUAN KERANGKA KONSEP KEMISKINAN DAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	IV.1
4.1. Kaji Ulang Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....	IV.1
4.2. Kajian Model Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	IV.11
4.3. Kesiapan Regulasi Pendukung Konsep Penanggulangan Kemiskinan	IV.15
 BAB V TINJAUAN KESIAPAN DATA DAN TATA KELOLA DATA SEBAGAI SINGGLE DATA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	V.1
5.1. Arah Tata Kelola Data Berbasis Keluarga	V.1
5.2. Arah Tata Kelola Data Berbasis Spasil/Lingkungan	V.19

BAB VI HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN.....	VI.1
6.1. Strategi Membangun Sinergitas Antar Stake Holder Pembangunan	VI.1
6.2. Strategi Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Model Intervensi	VI.7
6.3. Strategi Koordinasi dan Pengendalian Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kelembagaan	VI.10
6.4. Strategi Mengukur Pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Periodik	VI.13
 BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 VII.1
7.1. Kesimpulan	VII.1
7.2. Rekomendasi	VII.5
 DAFTAR PUSTAKA.....	 VIII.a

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Surakarta II-2
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2018-2022..... II-2
Tabel 2.3	Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2020-2022..... II-8
Tabel 2.4	Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2020 - 2022 II.9
Tabel 2.5	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Seri Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2020 - 2022 II.11
Tabel 2.6	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2020-2022..... II.12
Tabel 5.1	Indikator, Bobot Indikator dan Variable kemiskinan V.5
Tabel 5.2	Pengelompokan Kategori kesejahteraan V.10

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Peta Surakarta	II-1
Gambar 2.2 <i>Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk Kota Surakarta dari tahun 2018- 2022</i>	II-3
Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan	II-4
Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2018 – 2022 dan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022.....	II-5
Gambar 2.5 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, tahun 2022	II-6
Gambar 2.6 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta tahun 2018 – 2022	II-14
Gambar 2.7 Perkembangan Laju Inflasi Kota Surakarta Tahun 2017-2021.....	II-15
Gambar 2.8 Perkembangan IPM Kota Surakarta Tahun 2017-2022	II-16
Gambar 2.9 Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2022.....	II-17
Gambar 2.10 Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2017 – 2022	II-18
Gambar 2.11 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	II-19
Gambar 2.12 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2022	II-20
Gambar 2.13 Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	II-21
Gambar 2.14 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2022.....	II-22
Gambar 2.15 Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	II-23
Gambar 2.16 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 – 2022	II-24
Gambar 2.17 Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Ribuan Rupiah)	II-24
Gambar 3.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2017 - 2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)	III-2
Gambar 3.2 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	III-3
Gambar 3.3 Perbandingan realisasi dan target Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2017–2021 dan	

	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2022	III.4
Gambar 3.4	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2022	III.4
Gambar 3.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2017- 2022 (Jiwa)	III.5
Gambar 3.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta, kota lainnya Jawa tengah 2022 (Jiwa).....	III.6
Gambar 3.7	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2017-2022	III.6
Gambar 3.8	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Kota lainnya, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 .	III.7
Gambar 3.9	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta Tahun 2017 – 2022.....	III.8
Gambar 3.10	Posisi Relatif Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta dengan Kota Lainnya di Jawa TengahTahun 2022.....	III.8
Gambar 4.1	Circle faktor-faktor penyebab kemiskinan	IV.2
Gambar 4.2	Desain Strategi Pemetaan Situasi Kemiskinan dan Kelembagaan TKPKD Kota Surakarta	IV.5
Gambar 4.3	Instrumen Penanggulangan Kemiskinan	IV.6
Gambar 4.4	Penurunan angka kemiskinan di Kota Surakarta	IV.8
Gambar 4.5	Desain Rencana Kerja TKPKD	IV.10
Gambar 4.6	Struktur TKPKD Tingkat Kota.....	IV.12
Gambar 4.7	Struktur Tim Penanggulangan Kemsकिन Kelurahan (TPKK)	IV.14
Gambar 4.8	Tahapan Rapat Koordinasi TKPKD.....	IV.14
Gambar 5.1	Formulasi Penetapan Keluarga Miskin	V.5
Gambar 5.2	Tahapan Pendataan Berbasis keluarga	V.11
Gambar 5.3	Persebaran Kantong-kantong kemiskinan di Kota Surakarta berbasis Kecamatan	V.13
Gambar 5.4	Persebaran Kantong-kantong kemiskinan di Kota Surakarta berbasis Kelurahan dalam satu Kecamatan	V.13
Gambar 5.5	Persebaran Kantong-kantong kemiskinan di Kota Surakarta berbasis RW dalam satu Kelurahan	V.13
Gambar 5.6	Persebaran Kantong-kantong kemiskinan di Kota Surakarta berbasis RT dalam satu RW Kelurahan.	V.14
Gambar 5.7	Variabel Kemiskinan Berdasarkan Rumah Tangga sasaran (RTS) .	V.15
Gambar 5.8	Variabel Kemiskinan Berdasarkan Anggota Rumah Tangga (ART)..	V.16
Gambar 5.9	Fitur olah Query Rumah Tangga Sasaran	V.17
Gambar 5.10	Fitur olah Query Anggota Rumah Tangga (ART)	V.18
Gambar 5.11	Fitur Program Bantuan.....	V.19
Gambar 5.12	Alur Penggalan Masalah berbasis Lingkungan	V.21

Gambar 5.13 Tabel Form PPA di tingkat RW	V.24
Gambar 5.14 Tabel Kompilasi Hasil PPA tiap RW	V.24
Gambar 5.15 Tabel Merunut Masalah	V.25
Gambar 5.16 Gambar 5.16 : Tabel Matrik Kegiatan Renstramas	V.25
Gambar 5.17 Gambar 5.17 : Contoh hasil akhir Peta Infrastruktur Renstramas.....	V.26
Gambar 5.18 Gambar 5.18 : Contoh hasil akhir Peta Kesehatan Renstramas.....	V.27
Gambar 6.1 Kerangka Operasional penggunaan dokumen kesejahteraan dan renstramas kelurahan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.....	VI.1
Gambar 6.2 Penggunaan dokumen Berbasis keluarga dan spasial dalam perencanaan intervensi pada RW Prioritas (Lokasi terdampak).	VI.8
Gambar 6.3 Tahapan Koordinasi TPKK, Forum TPKK Kecamatan dan TKPKD...	VI.12
Gambar 6.4 Bussines data SIK, pengaruh variabel kemiskinan dan tingkat kesejahteraan.....	VI.14
Gambar 6.5 Desain tata kelola data sistem informasi kesejahteraan berbasis web.....	VI.16
Gambar 6.6 Contoh Format Identifikasi masalah renstramas yang sudah diselesaikan.....	VI.18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pada dasarnya adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang layak, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju keadaan atau kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pendayagunaan berbagai potensi dan sumberdaya yang tersedia untuk pembangunan telah digerakkan melalui perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan secara berkesinambungan, namun sampai saat ini masih belum dapat sepenuhnya memecahkan permasalahan yang ada termasuk kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia termasuk didalamnya pemerintah Kota Surakarta.

Pemerintah telah menerbitkan Perpres No.15 Tahun 2010 (diperbaharui dengan Perpres No.166 Tahun 2014) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Perpres tersebut, dibentuk suatu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat, yang diketuai oleh Wakil Presiden. Perpres yang sama juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang masing-masing diketuai oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. TKPK Daerah ini merupakan mitra kerja TNP2K dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip yang komprehensif, yaitu:

- (1) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial,
- (2) peningkatan akses pelayanan dasar,
- (3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan
- (4) pembangunan yang inklusif.

Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi:

- a) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin,
- b) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,
- c) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil,
- d) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya, yaitu: **Pertama**, kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, dengan tujuan memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. **Kedua**, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. **Ketiga**, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dengan tujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. **Keempat**, kelompok program-program lain, dengan tujuan secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Untuk memahami lebih dalam tentang kondisi kemiskinan dapat dilihat melalui 5 pendekatan yaitu :

1. Pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) :

- Kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum.

- Kebutuhan minimum yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

2. Pendekatan pendapatan (income approach).

- Kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.
- Pendekatan ini menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.

3. Pendekatan kemampuan dasar (human capability approach).

- Kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat.
- Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.

4. Pendekatan objektif

Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normative dan syarat yang harus dipenuhi keluar dari kemiskinan.

5. Pendekatan subjektif

Kemiskinan berdasarkan pendapatan atau pandangan orang miskin sendiri.

Sementara itu, secara kontekstual masalah kemiskinan di daerah dibentuk oleh kombinasi karakteristik wilayah (spasial), komunitas (meso), dan rumah-tangga (mikro). Berbeda daerah, maka berbeda juga masalah kemiskinannya. Terdapat karakteristik tertentu dari masalah kemiskinan atau secara empiris cenderung tipikal antar-daerah, oleh sebab itu ada masalah yang perlu diprioritaskan penanganannya. Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2019-2022) terus mengalami kenaikan yaitu sebesar 8,7%, 9,03%, 9,4% dan 8,84 % . Jumlah

penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 45.180 jiwa, tahun 2020 sebesar 47.030 jiwa, tahun 2021 meningkat menjadi 48.790 jiwa dan turun pada tahun 2022 menjadi sebesar 45.940 Jiwa.

Dinamika Naik turunnya angka kemiskinan di kota Surakarta mengindikasikan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang masih sangat rentan terhadap perubahan sosial, ekonomi dan politik. Dibutuhkan upaya meletakkan proporsi yang benar tentang : konsistensi antara Perencanaan, strategi, program, penentuan sasaran, mekanisme penyampaian atau pelembagaan dengan mengutamakan sinergi peran antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk kepentingan warga miskin.

1.2 DASAR HUKUM

Dalam hal melaksanakan pekerjaan “KAJIAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN PENGEMBANGAN DATA BERBASIS KELUARGA DAN SPASIAL DI KELURAHAN” Kota Surakarta, referensi dasar hukum pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar.
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
17. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
19. Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
21. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstreem tahun 2022-2024

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
24. Perda No. 11 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
25. Perwali Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan
26. Perwali Nomor 4 Tahun 2018 Tentang tata kelola data kemiskinan & Direvisi menjadi Perwali Nomor Nomor : 13 tahun 2019. Salah satu perubahannya adalah mendata warga miskin non KTP Surakarta, pemakaian android untuk verifikasi dan kategorisasi kesejahteraan.
27. Perwali Nomor : 27 Tahun 2019 tentang program pembebasan biaya pelayanan kesehatan (JKN-PBI) dimana kebijakan mengatur Universal health Coverage bagi masyarakat kota Surakarta baik miskin maupun tidak Miskin bagi yang mengajukan.
28. Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang diatur dalam perwali Nomor 11-A Tahun 2017, Merevisi SOP untuk menentukan sasaran harus berdasarkan data di Sistem informasi Kesejahteraan (e-sik).
29. Perwali Nomor : 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan musrenbang Kota Surakarta, Dimana mengatur usulan kegiatan harus mengacu pada dokumen RENSTRAMAS Kelurahan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Kajian Strategi Percepatan Penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan Data berbasis Keluarga dan Spasial di Kelurahan adalah untuk melihat efektivitas dokumen kemiskinan baik yang berbasis keluarga maupun berbasis Spasial yang sudah dilakukan kajian mendalam di setiap kelurahan, apakah sudah konsisten digunakan sebagai base line data perencanaan baik dalam menentukan kelompok sasaran maupun jenis layanan program oleh stake holder pembangunan kota Surakarta sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Adapun tujuan dari Kajian Strategi Percepatan Penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan Data berbasis Keluarga dan Spasial di Kelurahan untuk memastikan rencana percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dapat berjalan dengan baik, dari sisi kordinasi, sinergitas dan pengendalian program agar pencapaian penurunan angka kemiskinan bisa optimal.

1.4 HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)

Luaran/Output dari Kajian Strategi Percepatan Penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan Data berbasis Keluarga dan Spasial di Kelurahan adalah tersusunnya dokumen kajian efektifitas dokumen data kemiskinan berbasis Keluarga dan Spasial, Efektifitas mekanisme koordinasi kelembagaan Tim Penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan di tingkat Kota, serta strategi pengendalian program untuk mengukur komitmen dan keterpaduan antar stake holder pembangunan dalam membangun sinergitas antar sektoral mampu mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan Kota Surakarta.

1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan Kajian Strategi Percepatan Penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan Data berbasis Keluarga dan Spasial di Kelurahan adalah :

1. Analisis dan rekomendasi penggunaan data berbasis keluarga yang dikembangkan dalam aplikasi sistem Informasi kesejahteraan sebagai data dasar untuk menentukan target sasaran dan jenis layanan program bagi keluarga miskin;
2. Analisis dan rekomendasi data berbasis spasial/Rencana Strategis Masyarakat (RENSTRAMAS) Kelurahan sebagai data perencanaan pembangunan/Musrenbang untuk mengurangi kerentanan munculnya warga miskin baru dan mencegah tingkat keparahan kelompok miskin.
3. Analisis dan rekomendasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam melakukan koordinasi, sinergitas dan Pengendalian program percepatan penanggulangan kemiskinan.
4. Analisis dan rekomendasi strategi implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan.
5. Analisa lokasi prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan.

1.6 METODOLOGI

Kajian Strategi Percepatan Penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan Data berbasis Keluarga dan Spasial di Kelurahan ini menggunakan metode campuran (mixed methods) yang terdiri atas analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode ini digunakan untuk merumuskan interpretasi menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan di Kota Surakarta beserta karakteristik yang menyertainya.

- Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis dinamika pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta, memetakan kondisi kemiskinannya baik dari sisi kependudukan maupun kewilayahan, memetakan situasi kemiskinan baik dari sisi Rumah tangga Sasaran (RTS) maupun Anggota Rumah Tangga (ART) dari keluarga miskin.
- Metode kualitatif digunakan untuk mendalami konteks implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta baik dari sudut strategi membangun data spasial kemiskinan, penggunaan data sebagai baseline perencanaan, kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam kajian ini, tim kajian akan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan kota Surakarta. Data sekunder akan diperoleh dengan menelaah berbagai dokumen, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD Kota Surakarta, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah/LP2KD, dokumen RW modeling percepatan penanggulangan kemiskinan, dan dokumen terkait lainnya.

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN KAJIAN

BAB I	PENDAHULUAN
	Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH
	Pada bagian ini menguraikan tentang kondisi umum daerah dari sisi Aspek Geografis Dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi, Aspek Kualitas Dan Sumber Daya Manusia
BAB II	GAMBARAN KONDISI KEMISKINAN DAERAH
	Berisikan uraian tentang kondisi kemiskinan mencakup posisi relatif Indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
BAB IV	TINJAUAN KERANGKA KONSEP KEMISKINAN DAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
	Menguraikan tentang berbagai kesiapan Pemerintah Kota Surakarta dalam persiapan implementasi sejak keluarnya Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Mulai dari

definisi, pendekatan kemiskinan, ketersediaan data, dan desain tahapan rencana kerja serta penataan kelembagaan penanggulangan kemiskinan.

BAB V **TINJAUAN KESIAPAN DATA DAN TATA KELOLA DATA SEBAGAI SINGLE DATA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Menguraikan tentang strategi pengelolaan data kemiskinan yang berbasis keluarga dan spasial (renstramas), cara membangun data, pengelolaan data, penggunaan data kemiskinan dan pemetaan relevansi data kemiskinan dengan peran-peran di tiap bidang urusan.

BAB VI **HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang positioning data berbasis keluarga maupun berbasis spasial untuk membangun mekanisme koordinasi, sinergitas dan pengendalian program percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi TKPKD. Di bab ini diuraikan juga pola relasi hubungan TKPKD dengan TPKK di Kelurahan maupun Forum TPKK di Kecamatan.

BAB VII **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

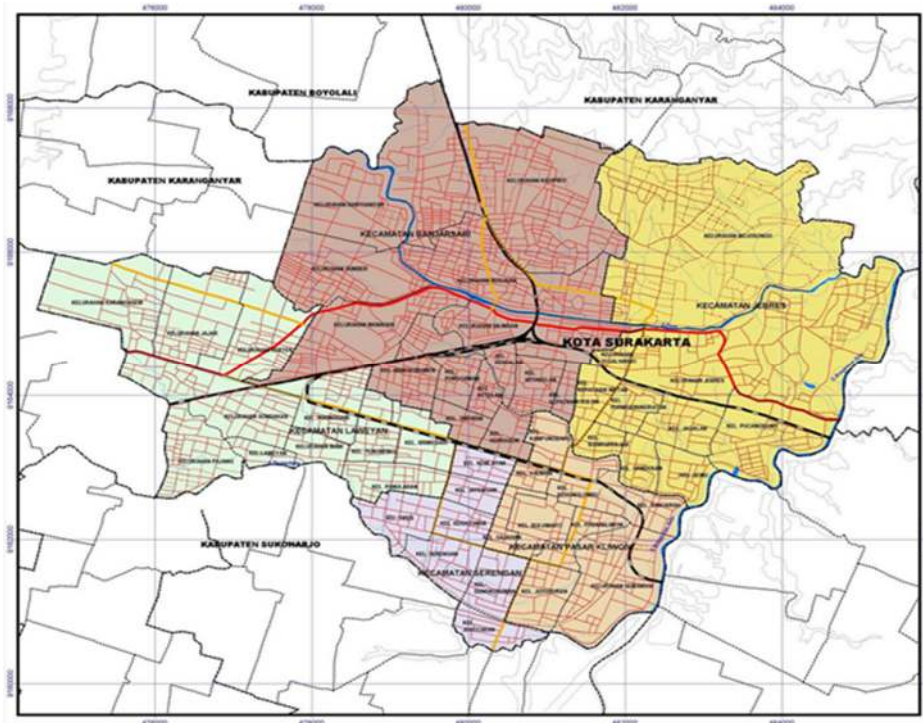
Berisi uraian tentang kondisi umum kemiskinan, strategi tata kelola data kemiskinan berbasis Rumah tangga dan spasial, pembagian peran prioritas intervensi di setiap rumah tangga dan spasial ke stake holder pembangunan, implikasi penyesuaian program dan anggaran belanja serta rencana koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB II

2.1.1 KONDISI GEOGRAFIS

Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15" dan 110° 45' 35" Bujur Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan, berada pada wilayah aglomerasi Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.
- Sebelah Timur: Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.



Gambar 2.1 Peta Surakarta

Luas wilayah Kota Surakarta adalah 46,724 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.786 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	RW	RT
Laweyan	11	9,126	105	458
Serengan	7	3,083	72	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,377	153	651
Banjarsari	15	18,41	195	930
Kota Surakarta	54	46,724	626	2.789

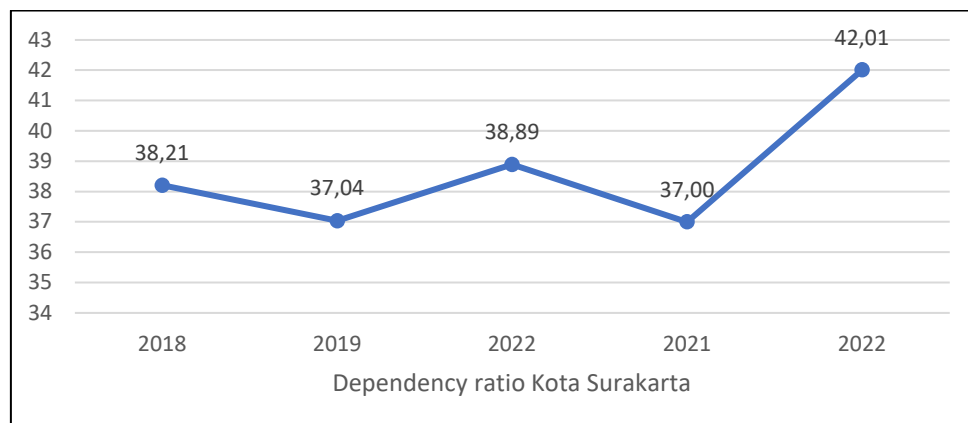
2.1.2 KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Surakarta pada tahun 2022 sebesar 523.008 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 280 jiwa dari tahun sebelumnya, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,05 dan kepadatan penduduk sekitar 11.193,51 jiwa/km². Rasio jenis kelamin 0,968. Secara lengkap perkembangan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2018-2022

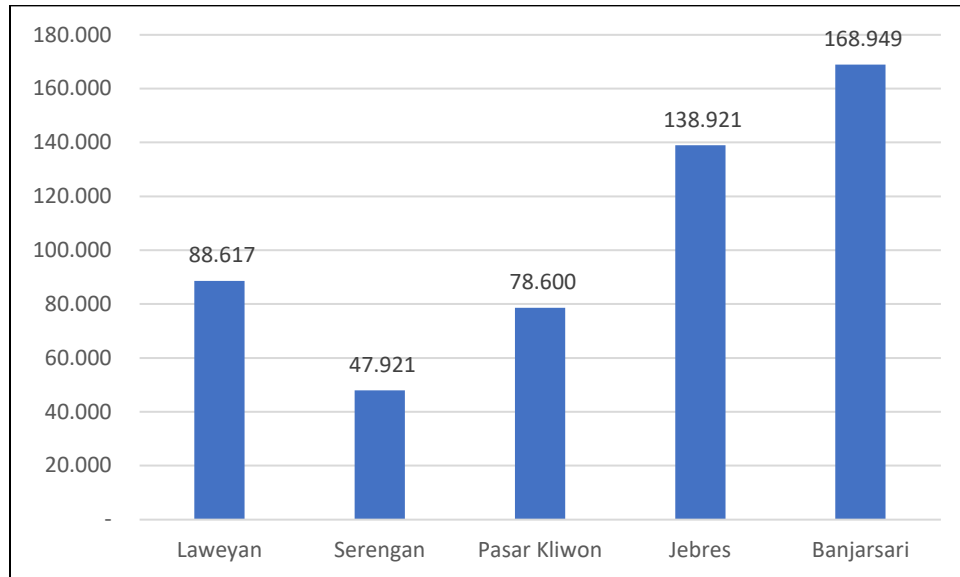
No	Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk	517.887	575.230	522.364	522.728	523.008
	Laki-laki	251.772	283.295	257.043	257.171	257.257
	Perempuan	266.115	291.935	265.321	265.557	265.751
2	Laju Pertumbuhan %	0,346	0,33	0,44	0,09	0,05
3	Rasio Jenis kelamin	0,95	0,97	0,969	0,9684	0,968
4	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km 2	11.759,31	13.061,53	11.861,13	11.187,52	11.193,51

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk Kota Surakarta dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuatif cenderung naik. Dari 38,21 pada tahun 2018 menjadi 42,01 pada tahun 2022. Angka tersebut termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi (tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41). Rasio ketergantungan tinggi akan berdampak pada beban tanggungan penduduk produktif tinggi, sehingga berisiko pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan risiko kerentanan kemiskinan. Berikut ini perkembangan Rasio ketergantungan Kota Surakarta.



Gambar 2.2 Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk Kota Surakarta dari tahun 2018- 2022

Persebaran penduduk Kota Surakarta berdasarkan Kecamatan tahun 2022, Kecamatan Banjarsari dengan jumlah penduduk tertinggi sebanyak 168.949 jiwa dan Kecamatan Serengan dengan jumlah penduduk terendah sebanyak 47.921 jiwa. Untuk data lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

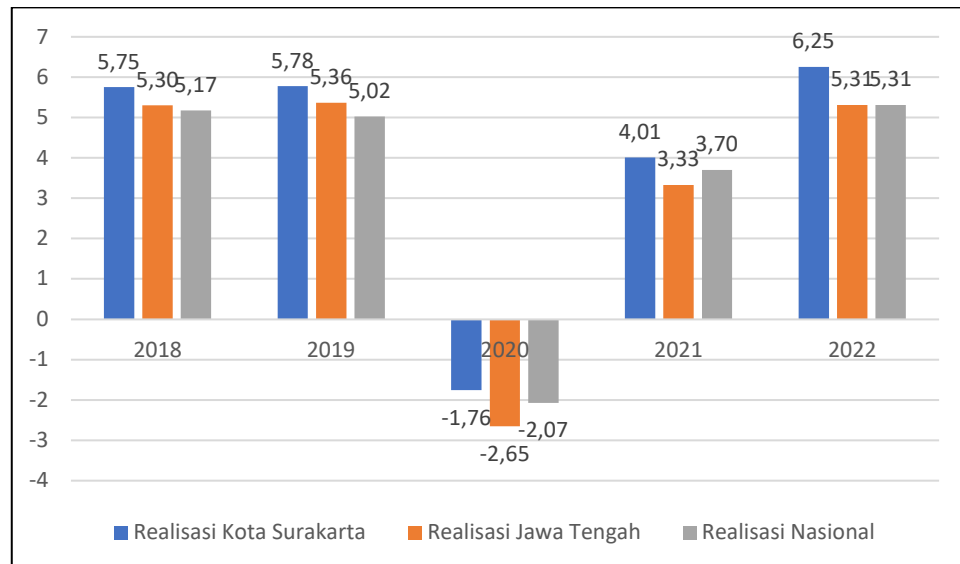


Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

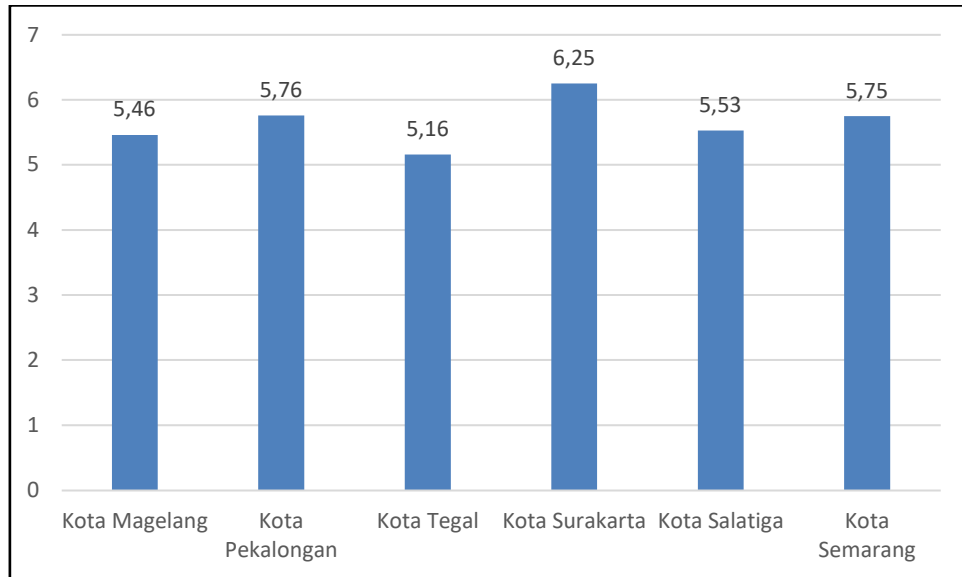
Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2019 relatif stabil, Tetapi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,76 %. Situasi kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemik juga terjadi di Propinsi Jawa Tengah sebesar -2,65 % dan di tingkat Nasional sebesar -2,07 %. Selengkapanya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2018 – 2022 dan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Seiring dengan terkendalinya pandemik covid 19 dan aktivitas perekonomian bisa normal kembali, kinerja perekonomian Kota Surakarta sudah menunjukkan perbaikan, dimana pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi bisa naik menjadi 4,01 % dibandingkan tahun 2020 yang mencapai -1,76 %. Bahkan secara agregat, kondisi perekonomian Kota Surakarta sudah benar-benar pulih dari masa pandemik covid 19, hal itu terlihat dari nilai PDRB 2022 sudah mencapai 6,25 % melampaui Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang mencapai 5,31%.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi pertama dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,25 %. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.5 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, tahun 2022

2.2.2 PDRB ADHB DAN PDRB ADHK

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2022 mencapai Rp. 55.964.803,85. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp. 50.371.564,19. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Salah satu penyebabnya adalah sudah adanya kelonggaran aktivitas masyarakat dimasa pemulihan ekonomi. Terlebih di Tahun 2021 hampir seluruh lini kegiatan sudah mulai dilakukan secara off line, baik di kegiatan pemerintah maupun

swasta. Kegiatan rapat dan event-event sudah diperbolehkan diselenggarakan secara off line di hotel. Event-event baik nasional maupun daerah seperti Pertandingan Liga Indonesia dan Haul Habib Syeckh juga memberikan andil dalam meningkatkan tingkat hunian kamar (TPK) hotel.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 14.517.922, 66 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 13.423.878,09. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 12.183.473,14, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 7.671.537,07. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp. 4.797.441,28. Berikutnya lapangan usaha jasa penyediaan akomodasi dan makan sebesar Rp. 3.602.864,07.

Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2022 yaitu peranan pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 197,51 karena tidak adanya lahan pertambangan, kemudian disusul sektor usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 265.553,36 salah satu penyebab utama adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2020-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	243.785,19	253.396,56	265.553,36
B	Pertambangan dan Penggalian	281,60	243,11	197,51
C	Industri Pengolahan	4.017.388,59	4.362.549,95	4.797.441,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	95.469,58	104.634,85	111.245,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	74.921,49	71.493,11	70.981,25
F	Konstruksi	12.878.839,68	13.423.876,09	14.517.922,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.306.413,83	11.062.420,64	12.183.473,14
H	Transportasi dan Pergudangan	491.167,78	524.376,11	1.294.670,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.167.235,46	2.379.346,01	3.602.864,07
J	Informasi dan Komunikasi	6.929.679,08	7.486.879,25	7.671.537,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.856.884,85	1.968.240,07	2.144.788,21
L	Real Estat	1.890.733,35	1.974.896,20	2.147.885,58
M,N	Jasa Perusahaan	387.892,84	402.026,46	453.360,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.567.427,62	2.574.052,99	2.692.897,04
P	Jasa Pendidikan	2.688.467,54	2.740.938,83	2.889.390,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	622.766,87	635.796,69	674.127,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	402.465,17	406.397,27	446.469,10
	Produk Domestik Regional Bruto	47.621.820,53	50.371.564,19	55.964.803,85

Sumber: BPS Surakarta, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 36.211.248,26 pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 38.475.988,36 pada tahun 2022. Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 9.067.626,56. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 8.605.954,38 diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 7.098.628,47. untuk perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2020 - 2022

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	149.001,94	152.191,74	155.546,81
B	Pertambangan dan Penggalan	174,08	148,36	116,56
C	Industri Pengolahan	2.598.563,54	2.757.755,01	2.915.401,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	80.914,24	86.460,08	91.174,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	60.886,07	58.270,83	56.546,88
F	Konstruksi	8.909.743,46	8.971.026,38	9.067.626,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.779.824,28	8.227.240,68	8.605.954,38
H	Transportasi dan Pergudangan	386.201,81	399.568,57	924.542,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.474.706,35	1.599.051,16	2.296.552,48
J	Informasi dan Komunikasi	6.455.883,90	6.951.672,31	7.098.628,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.206.749,40	1.234.323,51	1.261.340,69
L	Real Estat	1.482.893,04	1.533.565,90	1.622.052,68

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
M,N	Jasa Perusahaan	256.718,39	262.333,82	280.145,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.761.678,74	1.758.276,59	1.796.912,24
P	Jasa Pendidikan	1.481.236,98	1.483.178,66	1.532.096,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	425.010,18	430.202,70	446.538,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	305.778,92	305.981,96	324.811,93
	Produk Domestik Regional Bruto	34.815.965,32	36.211.248,26	38.475.988,36

Sumber: BPS Surakarta, 2022

Di Tahun 2022, dari 17 kategori yang ada, 15 kategori mengalami pertumbuhan yang positif dan 2 kategori mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan negatif ada pada kategori Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, dan Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami perlambatan yang signifikan mencapai -21,44 persen. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan jumlah penambang pasir di daerah Banyuwangi. Sedangkan salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang adalah berkurangnya jumlah debit air yang diproduksi PDAM pada tahun 2022 dibanding dengan produksi pada tahun 2021. Untuk perkembangan lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Seri Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2020 - 2022

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,93	2,14	2,20
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,15	-14,77	-21,44
C	Industri Pengolahan	-4,01	6,13	5,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,59	6,85	5,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,22	-4,30	-2,96
F	Konstruksi	-1,97	0,69	1,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,18	5,75	4,60
H	Transportasi dan Pergudangan	-62,54	3,46	131,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16,20	8,43	43,62
J	Informasi dan Komunikasi	19,70	7,68	2,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	2,28	2,19
L	Real Estat	0,43	3,42	5,77
M,N	Jasa Perusahaan	-8,53	2,19	6,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,15	-0,19	2,20
P	Jasa Pendidikan	-0,96	0,13	3,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,11	1,22	3,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	-14,32	0,07	6,15
	Produk Domestik Regional Bruto	-1,76	4,01	6,25

Sumber: BPS Surakarta, 2022

Kontribusi sumbangan agregat terhadap PDRB tahun 2022 yang paling besar ditunjukkan oleh kategori Konstruksi yaitu sebesar 25,94 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,77, selanjutnya informasi dan komunikasi di

posisi ketiga sebesar 13,7. Sedangkan yang paling kecil adalah kategori pertambangan yang persentasenya nol. Untuk lebih lengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2020-2022

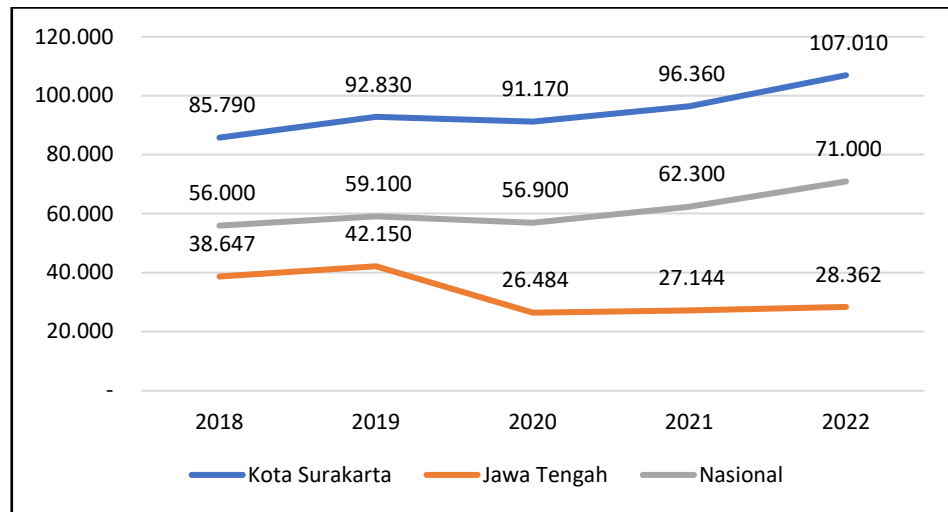
Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51	0,50	0,47
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	8,44	8,66	8,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,21	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,14	0,13
F	Konstruksi	27,04	26,65	25,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,64	21,96	21,77
H	Transportasi dan Pergudangan	1,03	1,04	2,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,55	4,72	6,44
J	Informasi dan Komunikasi	14,55	14,86	13,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,90	3,91	3,83
L	Real Estat	3,97	3,92	3,84
M,N	Jasa Perusahaan	0,81	0,80	0,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,39	5,11	4,81
P	Jasa Pendidikan	5,65	5,44	5,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,31	1,26	1,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,85	0,81	0,80
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100

Sumber: BPS Surakarta, 2022

2.2.3 PDRB PER KAPITA

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 79.670 ribu rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 sebesar Rp. 96.360 ribu rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan online, dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

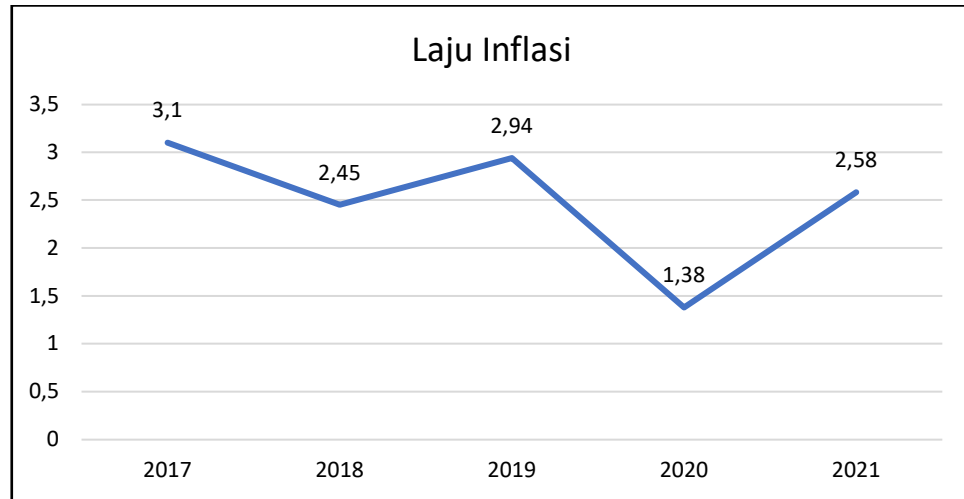


Gambar 2.7 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta tahun 2018 – 2022

LAJU INFLASI

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Perkembangan Laju inflasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan capaian yang positif yaitu pada tahun 2021 laju inflasi Kota Surakarta sebesar 2,58% meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,94%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



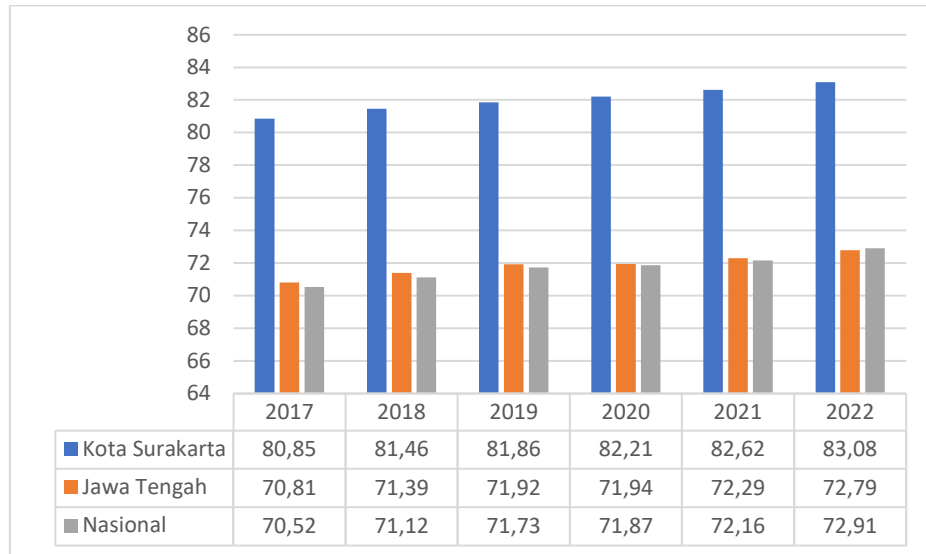
Gambar 2.7 Perkembangan Laju Inflasi Kota Surakarta Tahun 2017-2021

2.3 ASPEK KUALITAS DAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.3.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita, untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

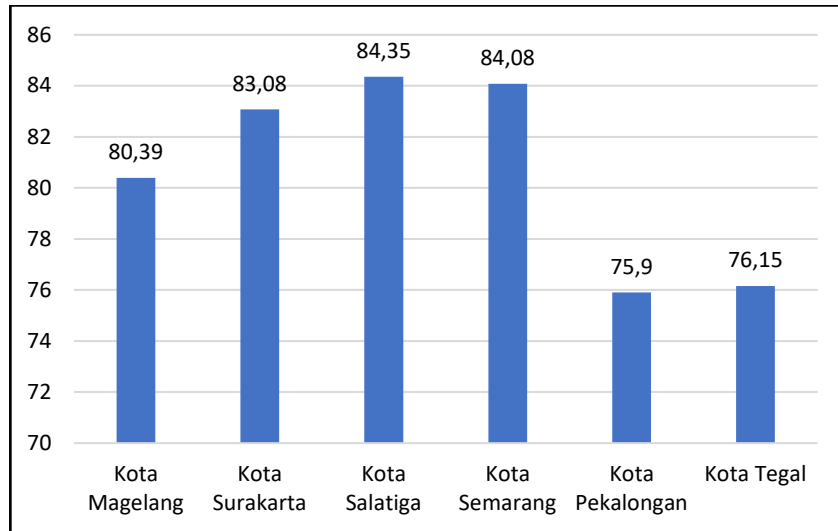
IPM Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami perkembangan meningkat yaitu, dari sebesar 82,62 menjadi sebesar 83,08. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama- sama mengalami peningkatan.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.8 Perkembangan IPM Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Pemerintah Kota Surakarta perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 83,08. Angka tersebut merupakan yang tertinggi nomor tiga di seluruh wilayah Jawa Tengah. Capaian tertinggi IPM di Jawa Tengah adalah di Kota Salatiga sebesar 84,35; Kota Semarang di peringkat kedua dengan indeks 84,08; dan Kota Surakarta menempati peringkat ketiga dengan indeks sebesar 83,08. Secara rinci terlihat pada gambar berikut :

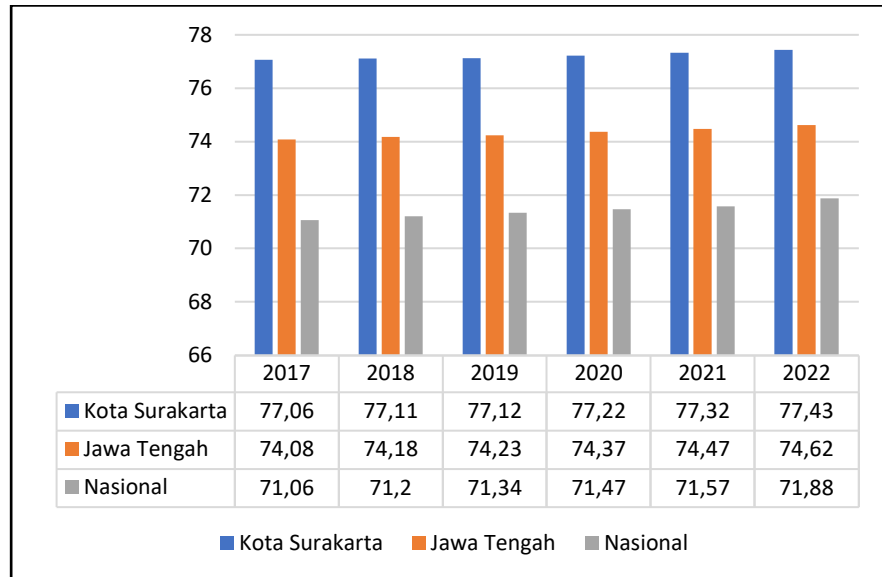


Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.9 Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2022

2.3.2 ANGKA HARAPAN HIDUP

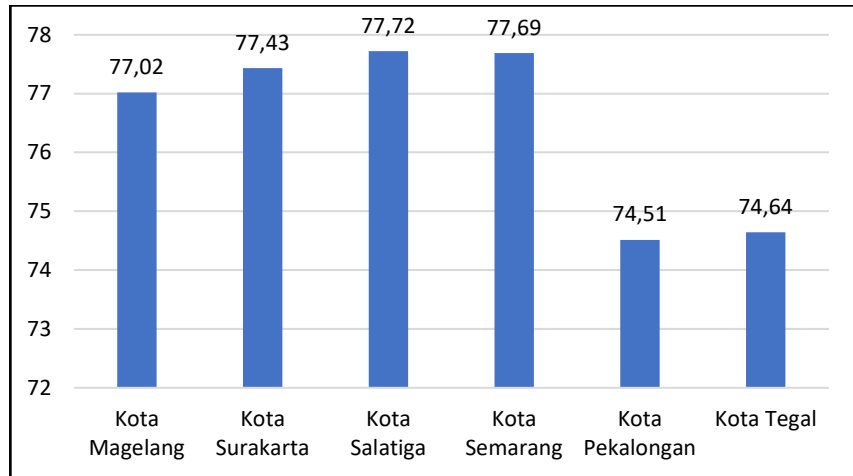
Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Surakarta secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2017 -2022 menunjukkan peningkatan. Dari tahun 2017 sebesar 77,03 tahun kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 77,22 tahun. Perkembangan angka harapan hidup kota Surakarta pada tahun 2017 - 2022 bisa dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.10 Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2017 – 2022

Selanjutnya, angka harapan hidup Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 77,43 tahun diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah (74,62 tahun) dan Nasional (71,87 tahun), dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (77,72 tahun) dan Kota Semarang (77,69 Tahun). Perbandingan Angka harapan hidup Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

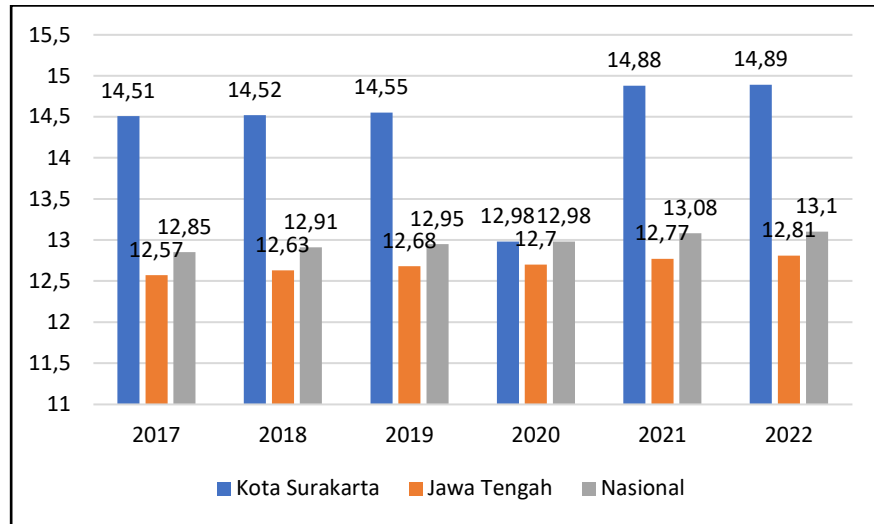


Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.11 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

2.3.3 ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH

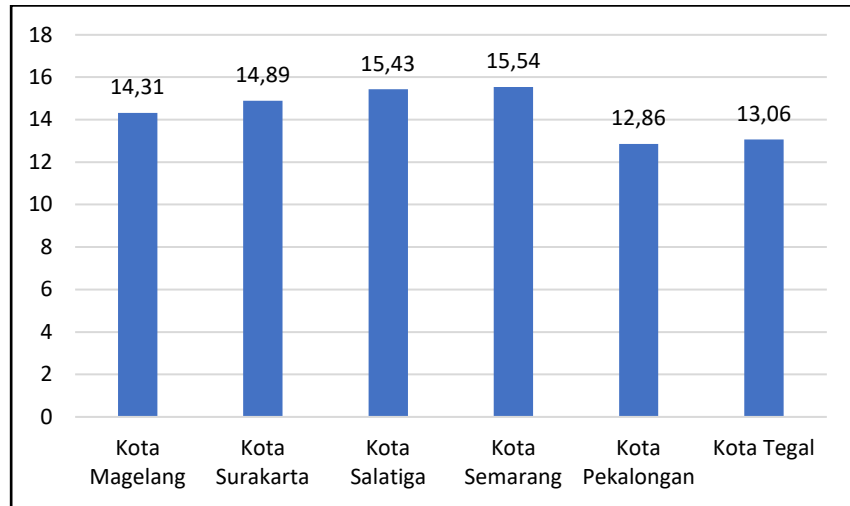
Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2017 - 2022 menunjukkan peningkatan. Dari sebesar 14,51 tahun pada tahun 2017 menjadi 14,89 tahun pada tahun 2022. Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Surakarta selama 2017- 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.12 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2022

Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta tahun 2021 sebesar 14,88 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (12,77 tahun) dan Nasional (13,08 tahun). Dibandingkan di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, angka harapan hidup Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Semarang (15,53 tahun) dan Kota Salatiga (15,42 tahun). Perkembangan Angka harapan lama sekolah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

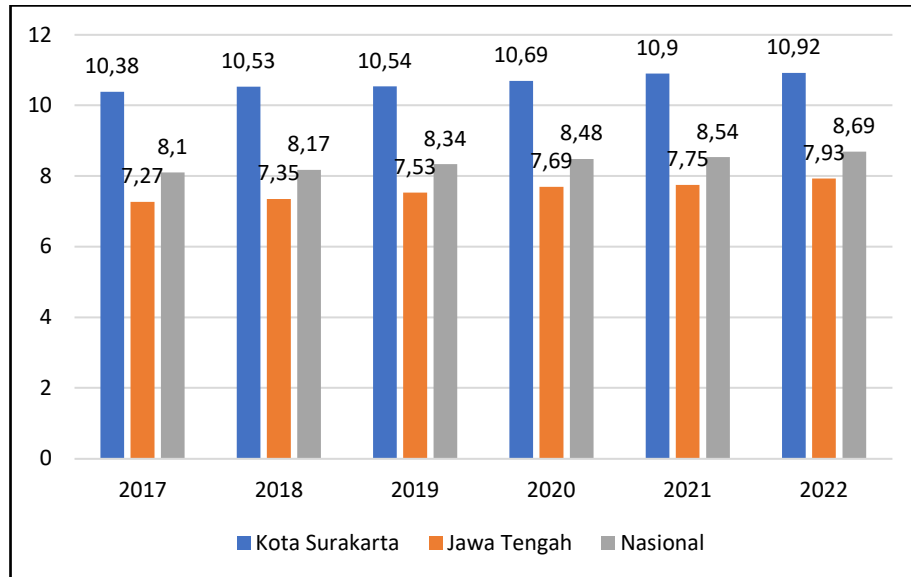


Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.13 Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

2.3.4 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

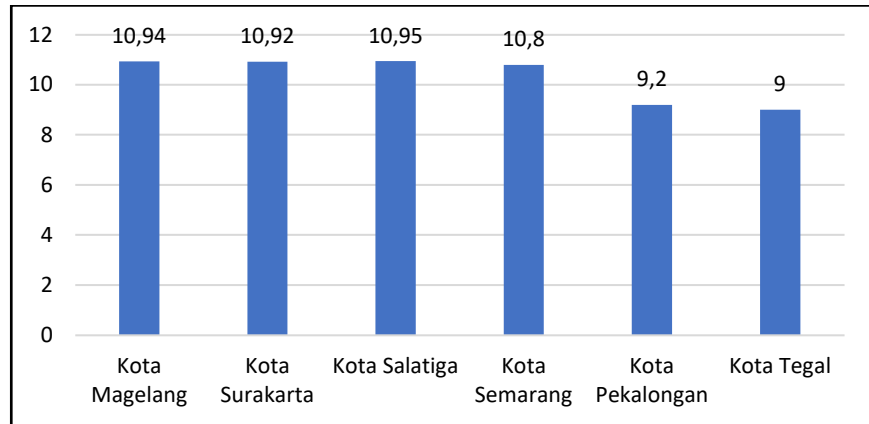
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu 2017 - 2022 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,38 tahun pada tahun 2017 menjadi 10,92 tahun pada tahun 2022, Angka rata-rata lama sekolah Kota Surakarta selama kurun waktu 2017 - 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.14 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2022

Posisi Rata-rata lama sekolah Kota Surakarta tahun 2022 sebesar 10,92 tahun, berada di atas rata-rata provinsi Jawa tengah (7,93 tahun) dan Nasional (8,69 tahun). Dibandingkan di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menempati urutan tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

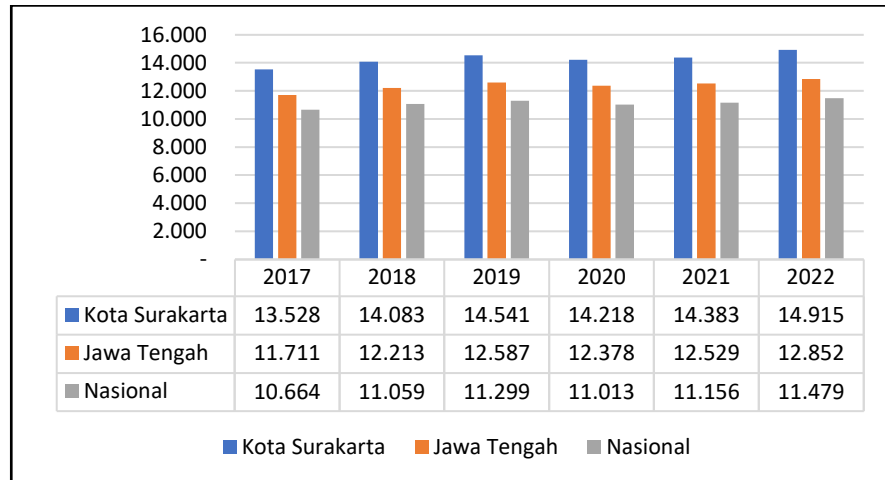


Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.15 Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

2.3.5 PENGELUARAN PER KAPITA

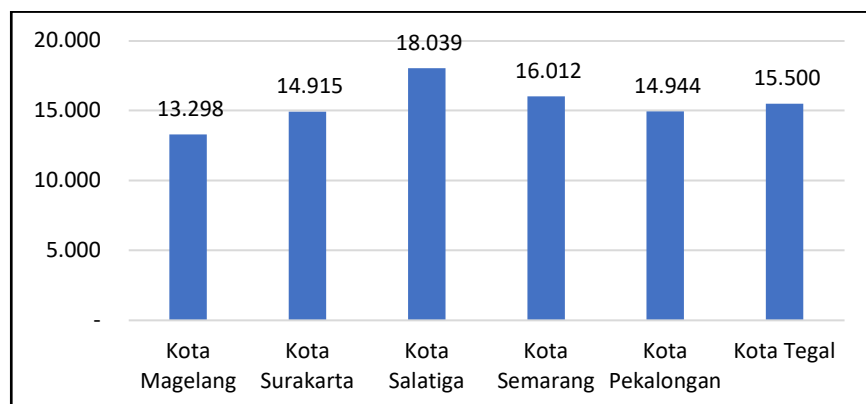
Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran perkapita di Kota Surakarta mengalami kenaikan dari Rp.13.528 ribu pada tahun 2017 menjadi Rp.14.915 ribu pada tahun 2022. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.16 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 – 2022

Posisi relatif pengeluaran per kapita Kota Surakarta tahun 2022 sebesar Rp. 14.915 ribu berada di atas Provinsi (Rp.12.852 ribu) dan Nasional (Rp.11.439 ribu). Capaian pengeluaran per kapita Kota Surakarta menempati posisi kelima setelah Kota Salatiga (Rp.18.039 ribu), Kota Semarang (Rp.15.012 ribu), Kota Tegal (Rp. 15.500 ribu) dan Kota Pekalongan (Rp. 14.944 ribu). Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.17 Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Ribu Rupiah)

BAB III

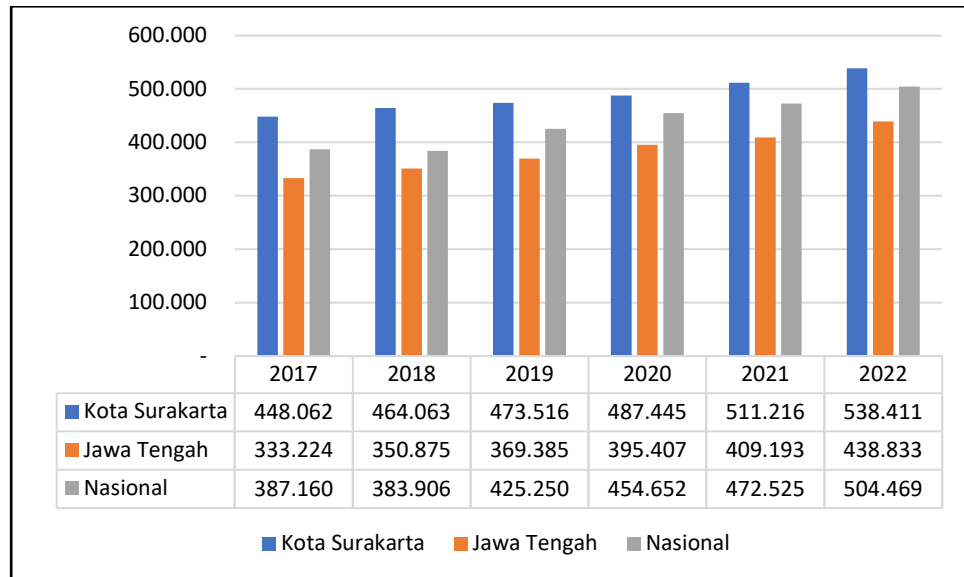
KONDISI KEMISKINAN DAERAH

3.1 GARIS KEMISKINAN

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

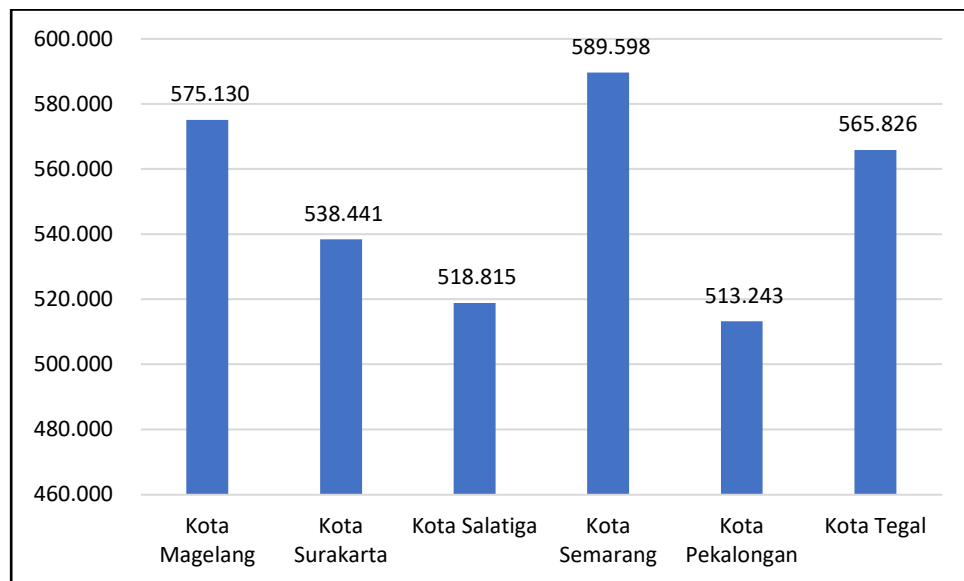
Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kota Surakarta. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Penurunan angka kemiskinan dipengaruhi juga oleh besaran Garis Kemiskinan yang menjadi klasifikasi seseorang termasuk pada kategori miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan di Kota Surakarta memiliki kecenderungan kenaikan yang besar dalam enam tahun terakhir (2017-2022), dengan kenaikan mencapai Rp.90.379. Tingkat kenaikan yang cukup tinggi setiap tahunnya cukup berpengaruh terhadap ukuran pengeluaran penduduk miskin jika tidak diimbangi dengan peningkatan rata-rata pendapatan penduduk miskin. Jika melihat besaran garis kemiskinan di Kota Surakarta ditahun 2022 sebesar Rp. 538.411 lebih tinggi jika dibandingkan dengan besaran garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 438.833 dan Nasional Rp 504.469. Untuk data lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 3.1 menyajikan perkembangan Garis Kemiskinan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Garis Kemiskinan pada tahun 2022 sebesar Rp 538.441,00 per kapita per bulan.



Gambar 3.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2017 - 2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)

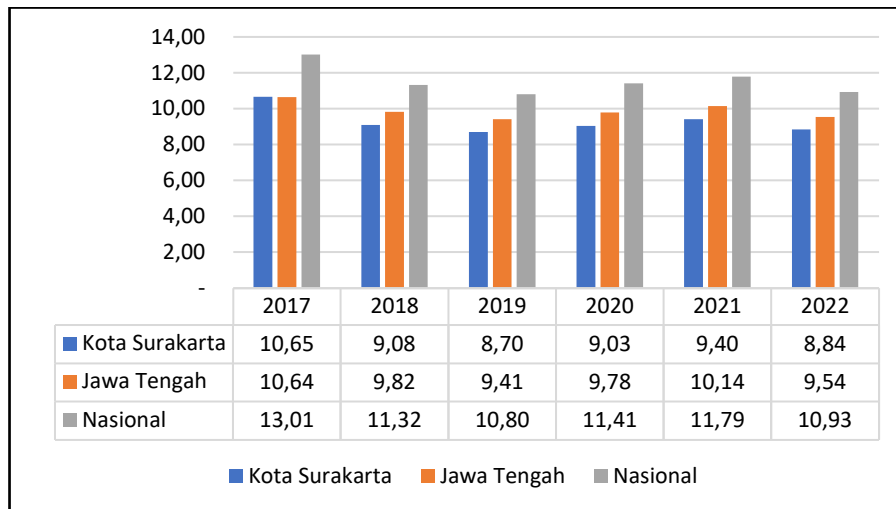
Ukuran garis kemiskinan di Kota Surakarta jika dibandingkan dengan Kota lainnya di Jawa Tengah angkanya termasuk dalam kategori tinggi. Garis kemiskinan Kota Surakarta sebesar Rp. 538.441 relatif tinggi jika dibandingkan dengan kota lainnya. Kota Surakarta menempati posisi keempat tertinggi setelah Kota Semarang sebesar Rp. 589.598, Kota Magelang sebesar Rp. 575.130 dan Kota Tegal sebesar Rp 565.826. Perbandingan garis kemiskinan Kota Surakarta dengan daerah sekitar selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 3.2 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

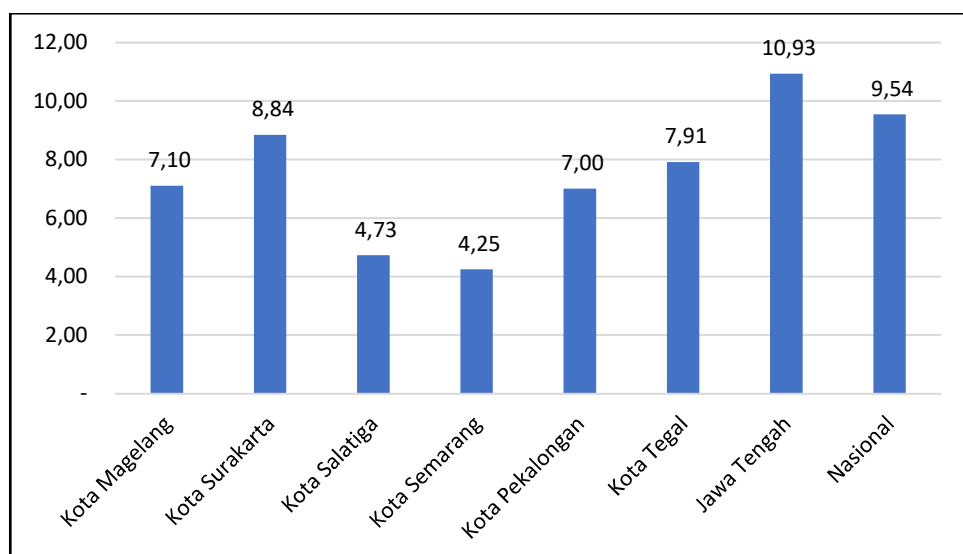
3.2 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta kondisinya selalu menurun dari tahun ke tahun pada periode lima tahun terakhir (2017- 2022), pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kota Surakarta mencapai 10,65 %, pada tahun 2022 persentase penduduk miskin berhasil diturunkan hingga 8,84%. Hal tersebut berarti berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan cukup berhasil. Data lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. Capaian keberhasilan penanggulangan kemiskinan kota Surakarta terjadi pada tahun 2018 dengan penurunan mencapai 1,57 % (Prosentase 2018: 9,08 %) dibandingkan tahun 2017 prosentasenya sebesar 10,65 %.



Gambar 3.3 Perbandingan realisasi dan target Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2017–2021 dan Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017–2022

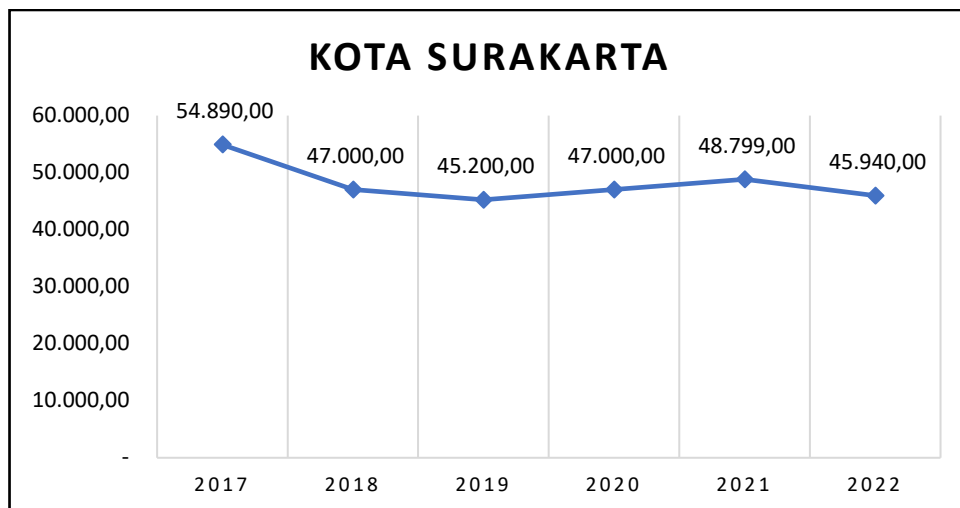
Persentase kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 8.84%, menjadikan persentase kemiskinan Kota Surakarta tertinggi diantara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun masih rendah dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 9,54% dan Nasional sebesar 10,93%. Ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan Kota Surakarta masih dapat dikatakan belum optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Gambar 3.4 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2022

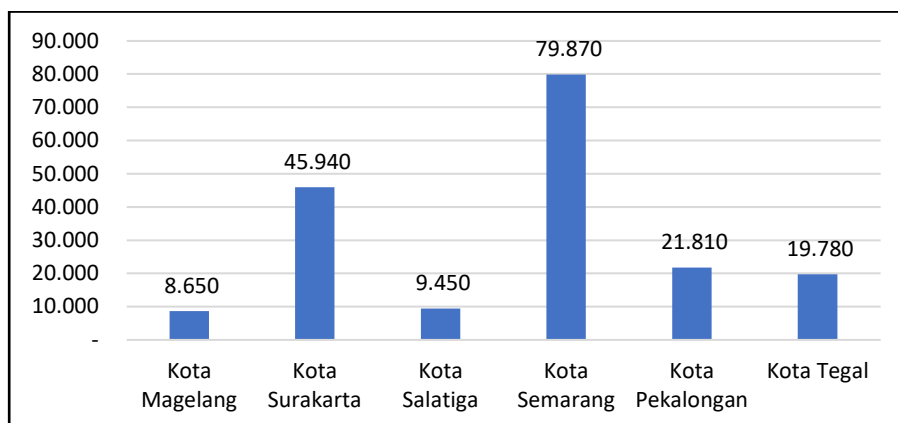
3.3 JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2022, terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Kota Surakarta tahun 2017 sebesar 54.890 jiwa menurun sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 45.180 jiwa, tetapi pada tahun 2020 terkoreksi kembali menjadi 47.000 jiwa akibat Pandemi COVID 19. Kembali meningkat kembali pada tahun 2021 yaitu sebesar 48,790, kemudian terakhir di 2022 menjadi 45.940 Perkembangan jumlah penduduk miskin secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2017- 2022 (Jiwa)

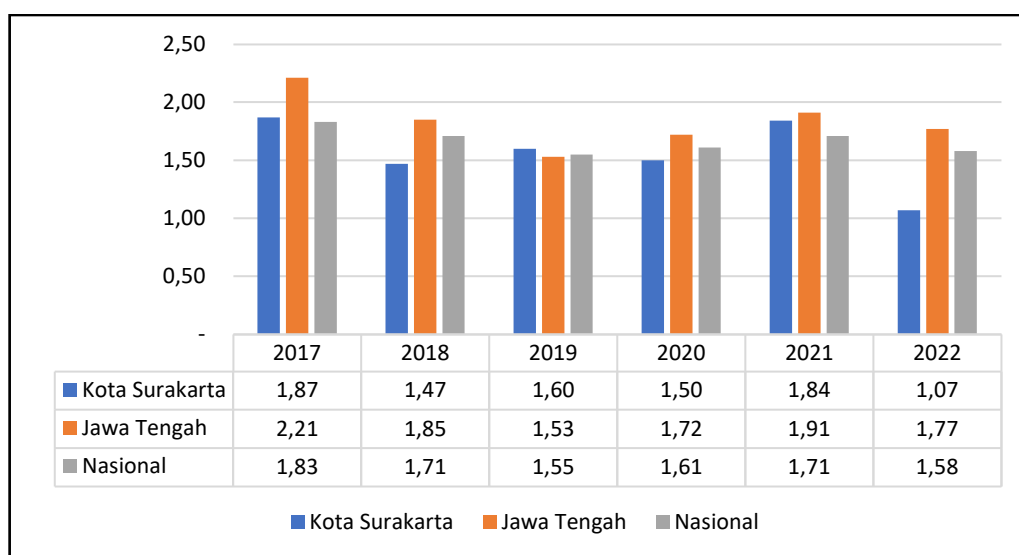
Jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta merupakan tertinggi kedua dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah, urutan pertama di tempati Kota Semarang dengan capaian 79.870, kemudian Kota Surakarta dengan angka 45.940, kemudian Kota Pekalongan dengan angka 21.810. Perkembangan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Gambar 3.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta, kota lainnya Jawa tengah 2022 (Jiwa)

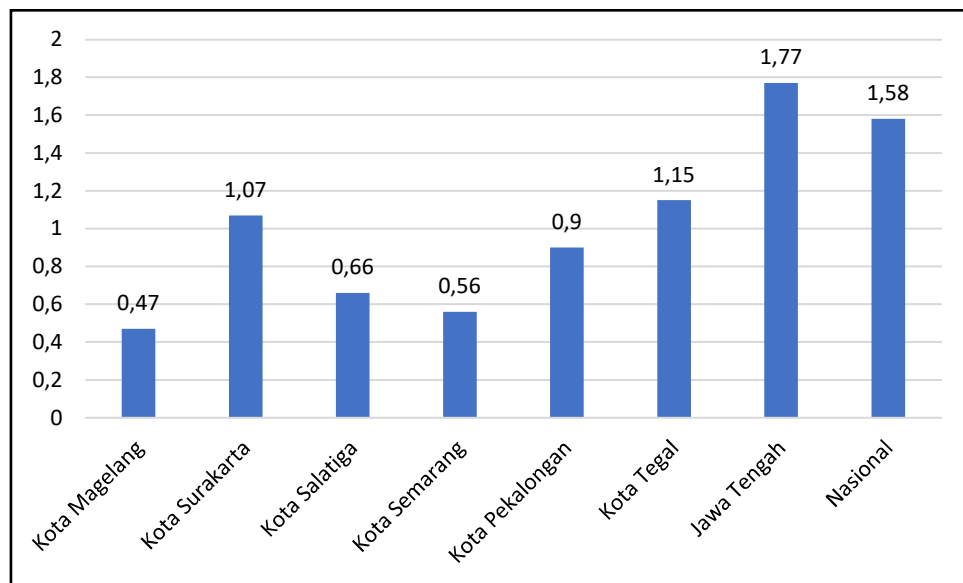
3.4 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta pada tahun 2017 sebesar 1,87, kemudian pada tahun 2018 kembali turun menjadi 1,47 lalu pada tahun 2019 meningkat kembali pada angka 1,60, dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,50. Pada tahun 2021 naik pada angka 1,83, dan pada 2022 turun di angka 0,27. Kondisi pergerakan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta dapat dilihat pada di bawah ini.



Gambar 3.7 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2017-2022

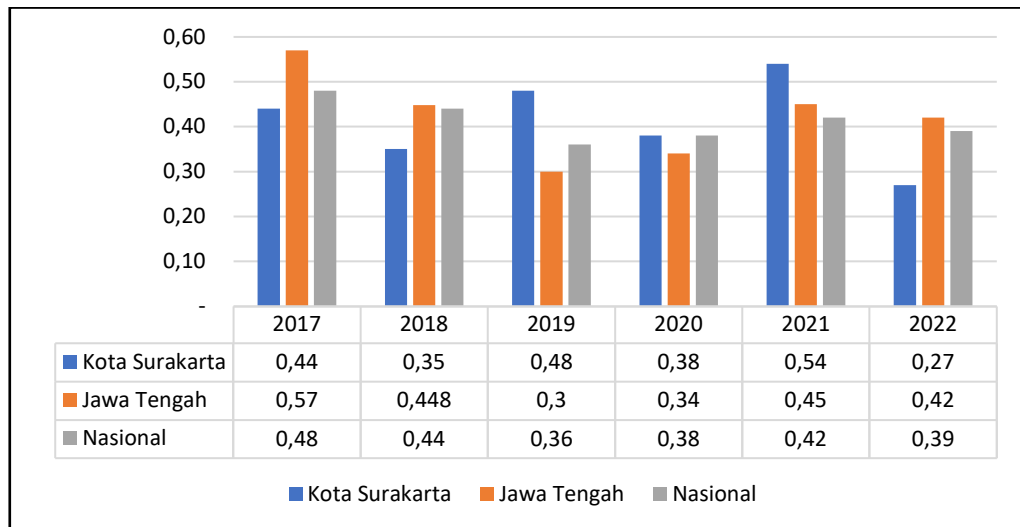
Indeks kedalaman kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 1,07 termasuk dalam kelompok indeks kedalaman kemiskinan tertinggi diantara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, setelah Kota Tegal dengan capaian 1,15. Namun berada dibawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 1,77 dan Nasional sebesar 1,58. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih tinggi.



Gambar 3.8 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Kota lainnya, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

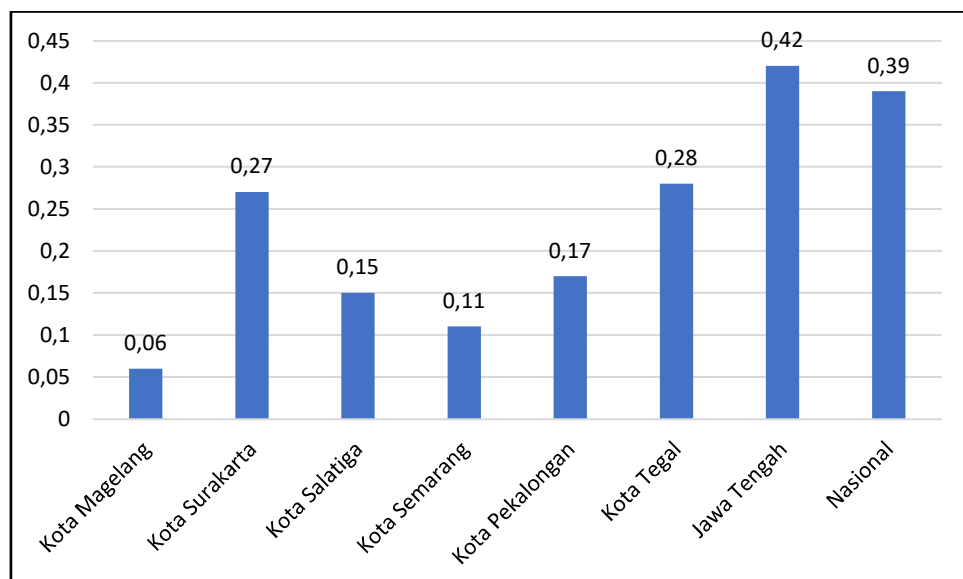
3.5 INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)

Sementara itu, Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2017-2022) di Kota Surakarta menunjukkan tren fluktuasi, yaitu sebesar 0,44 pada tahun 2017 naik kembali menjadi 0,27 pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 3.9 Perkembangan Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) Kota Surakarta Tahun 2017 – 2022

Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 0,27 menempati posisi kedua bila dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, pertama adalah Kota Tegal dengan angka 0,28 capaian Kota Surakarta berada di bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,42 dan Nasional sebesar 0,39. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 3.10 Posisi Relatif Keparahana Kemiskinan (P2) Kota Surakarta dengan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2022

BAB IV
TINJAUAN KERANGKA KONSEP KEMISKINAN
DAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1 KAJI ULANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sejak keluarnya Peraturan Presiden Nomer 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 42 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Surakarta melakukan proses penyusunan kerangka konsep, implementasi, data dan kelembagaan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun beberapa kajian merumuskan beberapa yang terkait dengan Definisi kemiskinan, aspek kemiskinan, Faktor penyebab kemiskinan, Paradigma dan Penanggulangan kemiskinan dan dituangkan ke dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) atau istilah yang digunakan saat ini adalah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

4.1.1 *Evaluasi Definisi Kemiskinan*

Dalam pengertian konvensional, kemiskinan hanya dimaknai sebagai permasalahan pendapatan (income) individu, kelompok, komunitas, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan konsep United Nation Development Program (UNDP), bahwa seseorang dikatakan miskin, jika tingkat pendapatannya hanya berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pada negara berkembang, baik pemerintah maupun organisasi

nonpemerintah kebanyakan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan. Itu sebabnya, berbagai upaya penanganan kemiskinan itu tidak menyelesaikan masalah dan cenderung gagal karena hanya pada pendekatan pendapatan.

Banyak studi menunjukkan secara umum kemiskinan di Indonesia berkaitan erat dengan masalah ketenagakerjaan dan kewirausahaan, tidak meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tidak memadainya infrastruktur (prasarana) dasar, rentannya kecukupan pangan, serta permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut dalam konsep disebut dengan kemiskinan non konsumsi. Dampak (impact) program penanggulangan kemiskinan yang digambarkan menggunakan indikator kemiskinan non konsumsi meliputi bidang ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan infrastruktur dasar, serta sosial.

Dalam kerangka konsep tersebut, Pemerintah Kota Surakarta merumuskan definisi kemiskinannya adalah ***“Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya terkait dengan masalah pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin.”***

Dari definisi kemiskinan tersebut digambarkan faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu :



Gambar 4.1 Circle faktor-faktor penyebab kemiskinan

4.1.2 Evaluasi Strategi Pendekatan Kemiskinan

Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral, dan charity dalam kenyataannya justru menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat seperti gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan. Lemahnya kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi kapital sosial yang memudar dan melemah salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil dan tidak transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan, ketidakpedulian dan skeptisme masyarakat.

Kelemahan dari paradigma penanggulangan kemiskinan lama yaitu Pendekatan dan pengkajian masih berporos pada paradigma modernisasi yang bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi dan model yang berpusat pada produksi. Adapun Kelemahan paradigma penanggulangan kemiskinan lama adalah sebagai berikut :

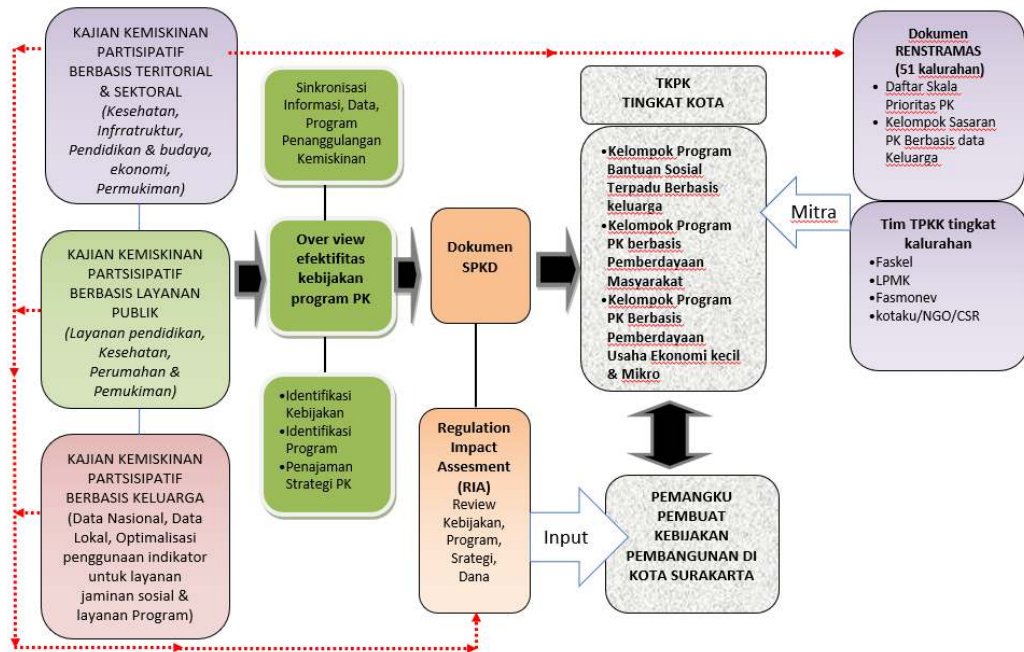
- Masih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi makro
- Kebijakan yang terpusat (sentralisasi) dan seragam.
- Lebih bersifat karitatif
- Memposisikan masyarakat sebagai obyek.
- Cara pandang tentang kemiskinan yang hanya berorientasi pada ekonomi.
- Asumsi permasalahan dan penanggulangan kemiskinan yang sering dipandang sama (one fit for all).
- Bersifat parsial dan sektoral.
- Kurang memperhatikan keragaman budaya
- Pendekatan yang top down
- Tumpang tindihnya program dan kelompok sasaran.

- Kurang terintegrasi
- Tidak berkelanjutan.

Paradigma lama berdampak pada rancangan program penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial, belum terintegrasi antara Stake holder yang satu dengan Stake Holder yang lain. Dari pandangan tersebut kemudian dirumuskan paradigma baru yaitu penanggulangan kemiskinan berpusat pada manusia (people centre) dan Prinsip-prinsip paradigma baru adalah sebagai berikut :

- Kemiskinan tidak hanya dilihat dari karakteristik orang miskin yang statis, melainkan dilihat secara dinamis.
- Indikator untuk mengukur kemiskinan adalah komposit.
- Konsep kemampuan sosial (social capabilities) dipandang dari pendapatan dalam memotret dinamika kemiskinan; dan
- Pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin pada beberapa indikator kunci mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (lifelihoods capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fullfilment), mengelola aset (asset management), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (access to social capital), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (cope with shocks and stresses).

Dari pendekatan paradigma baru tersebut maka, dibutuhkan upaya penataan data baik berbasis keluarga miskin, berbasis spasial (persoalan lingkungan) dan berbasis sektoral (mata pencaharian) yang dikenal sebagai Rencana Strategis Masyarakat (RENSTRAMAS) Kelurahan, dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan partsipatif dengan melibatkan seluruh stake holder pembangunan.



Gambar 4.2 Desain Strategi Pemetaan Situasi Kemiskinan dan Kelembagaan TKPKD Kota Surakarta.

Strategi umum penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta merujuk pada Perpres No. 15 Tahun 2010, memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Ketiga tujuan tersebut dilakukan dengan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Bentuk sinergi ini dilaksanakan melalui strategi umum dilakukan dengan model / sistem kluster sebagai berikut:

1. Kluster 1: Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

2. Klaster 2: Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Klaster 3: Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
4. Klaster 4: Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.



Gambar 4.3 Instrumen Penanggulangan Kemiskinan

Di Kota Surakarta, strategi umum tersebut dikontekstualisasikan dengan pendekatan yang dijiwai oleh prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu perpaduan antara teknokratis, top down, bottom up dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kota Surakarta akan mengembangkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kelurahan. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kelurahan, yaitu:

1. Mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas SKPD (Istilah saat ini OPD) untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan memperhatikan permasalahan khusus tiap kelurahan:
2. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber pendanaan: PNPM (Berubah menjadi KOTAKU), swasta (corporate social Responsibility), dan swadaya masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan memperhatikan permasalahan khusus tiap kelurahan
3. Mengaktifkan fasilitator lingkungan untuk memberdayakan masyarakat basis memasukkan permasalahan kemiskinan komunitasnya ke dalam rencana strategis Kelurahan, terutama untuk pengelolaan penggunaan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).

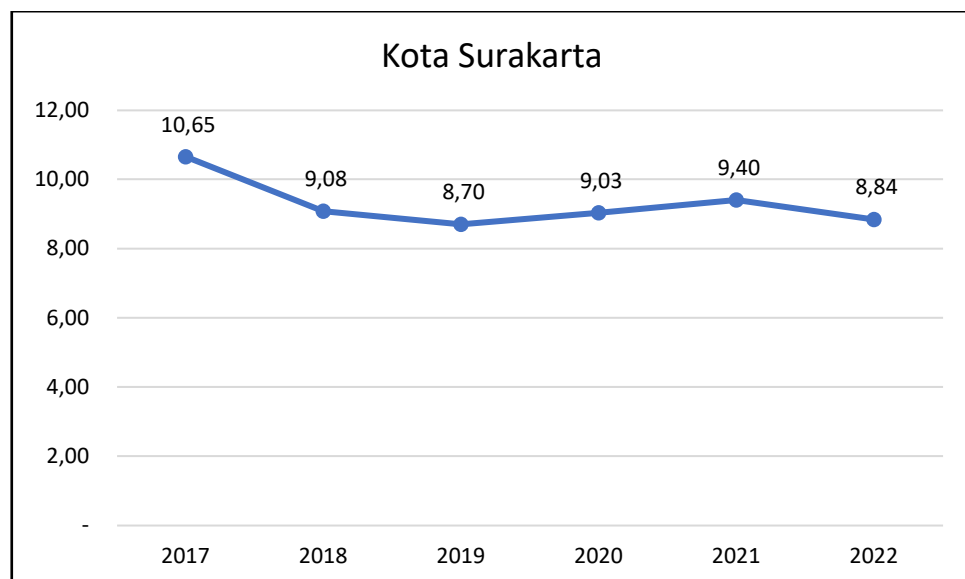
Untuk mencapai percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kelurahan, maka disetiap kelurahan didorong untuk membangun data yang akan menjadi dasar rujukan percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu :

Faktor Penyebab Kemiskinan	Ketersediaan dokumen
Ketidakmampuan yang menghambat warga miskin, hampir, rentan miskin dalam melakukan proses berusaha dan meningkatkan kapasitas karena karena minimnya daya dukung lingkungan	Metodologi Kajian kemiskinan Partisipatif Berbasis Spasial dengan memetakan 4 Issu yaitu : Kesehatan, Infrastruktur, Pendidikan dan permukiman
	Dokumen yang dihasilkan di sebut Rencana Strategis Masyarakat (RENSTRAMAS) Kelurahan
Ketidak mampuan warga miskin, hampir, rentan miskin dalam menjalankan usaha ekonomi karena minimnya daya dukung peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas produksi serta pemasaran	Metodologi Kajian kemiskinan Partisipatif Berbasis Mata Pencapaian (Memperkuat dokumen RENSTRAMAS bidang Ekonomi)
	Dokumen yang dihasilkan adalah potensi ekonomi kelurahan

Faktor Penyebab Kemiskinan	Ketersediaan dokumen
Ketidak mampuan warga miskin, hampir, rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan karena ketidakberdayaannya dalam memenuhi hak dasar	Metodologi Kajian kemiskinan Partisipatif Berbasis Keluarga miskin
	Dokumen Sistem Informasi Kesejahteraan

4.1.3 Evaluasi Tantangan Implementasi Penyelesaian Kemiskinan terkait dengan ketersediaan data Kemiskinan

Sebelum lahirnya peraturan presiden nomer 15 tahun 2010, Pemerintah kota surakarta telah mengembangkan data lokal untuk memberikan layanan jaminan Kesehatan bagi masyarakat dengan program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (PKMS) dan daftar warga keluarga miskin tersebut ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Walikota Surakarta yang disahkan setiap enam bulan sekali. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta, masih belum mampu mengurangi prosentase kemiskinan secara signifikan. Hal ini bisa dilihat dari gambar penurunan angka kemiskinan di bawah ini :



Gambar 4.4. Penurunan angka kemiskinan di Kota Surakarta

Dari berbagai kajian yang dilakukan problematika yang terjadi lambatnya angka penurunan kemiskinan dipengaruhi beberapa hal diantaranya :

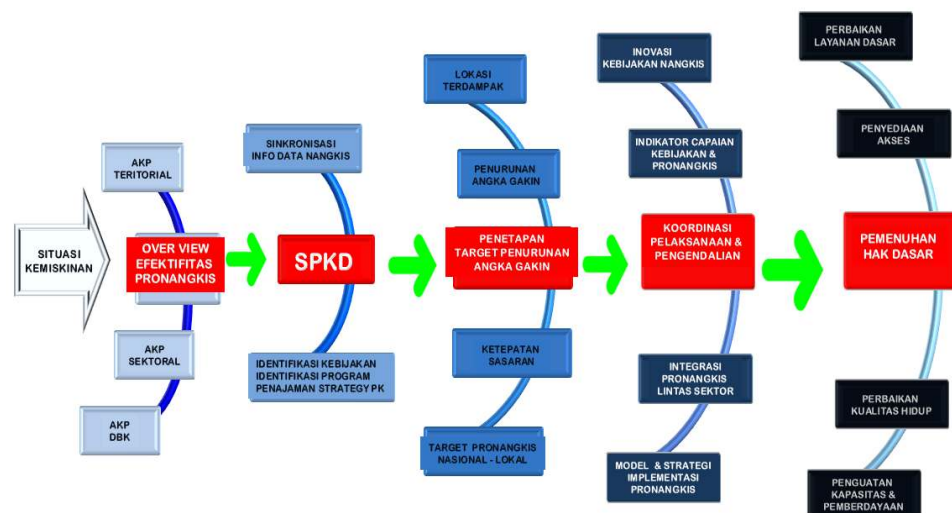
- a. Dinamika Munculnya warga miskin baru bisa terjadi setiap saat, sehingga basis data yang selama ini dijalankan dan diperbaharui setiap 3 tahun sekali oleh Nasional dipastikan tidak bisa menangkap warga miskin baru ketika belum dilakukan pendataan ulang.
- b. Penurunan angka kemiskinan tiap tahun yang di release oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersifat makro, sehingga tidak bisa diketahui by name by address warga yang sudah keluar dari kemiskinan.
- c. Tidak dimilikinya data By name by address warga miskin di Kota Surakarta, termasuk indikator kemiskinan sebagai informasi kebutuhan dari keluarga miskin, sehingga pemerintah kota Surakarta tidak memiliki data sebagai rujukan warga yang akan diintervensi oleh APBD. Hal ini dipengaruhi kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) yang tidak mendistribusikan data warga miskin ke daerah.
- d. Masih banyak data warga yang lebih miskin justru tidak masuk dalam data nasional, sehingga tidak mendapatkan layanan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini berdampak tidak tepatnya sasaran program karena kurang akurasi data.

Dari problematika diatas berdampak pada :

- Rancangan Program Penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial, belum terintegrasi antara Stake holder yang satu dengan Stake Holder yang lain.
- Tidak tepat sasaran Program karena kurang akurasi data, dan lemahnya informasi kebutuhan masyarakat miskin.
- Tidak terdistribusinya data kemiskinan pada setiap stake holder pembangunan Kota, sehingga masing-masing bekerja dengan data yang dimiliki masing-masing.

- Rancangan Program Penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial, belum terintegrasi antara Stake holder yang satu dengan Stake Holder yang lain.
- Mekanisme koordinasi dan Kualitas Rapat Koordinasi, Sinergitas dan Pengendalian dalam TKPKD belum terarah dengan baik.

Selain tantangan atas ketersediaan data, proses percepatan penanggulangan kemiskinan perlu meletakkan proporsi yang benar tentang : konsistensi antara Perencanaan, strategi, program, penentuan sasaran, mekanisme penyampaian dengan mengutamakan sinergi peran antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk kepentingan warga miskin. Pemerintah kota Surakarta membangun konsensus bersama Untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan pemenuhan hak dasar dan pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan, adapun konsensus tersebut dituangkan dalam desain rencana kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta sebagai berikut :



Gambar 4.5 Desain Rencana Kerja TKPKD

4.2 KAJIAN MODEL KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

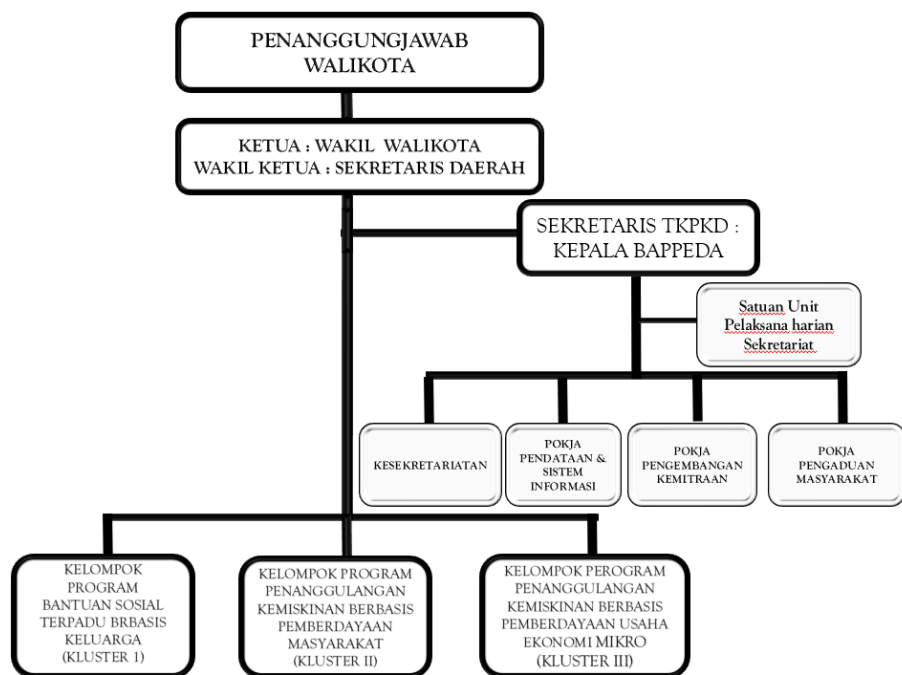
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan sesuai dengan Bab I Pasal 1, ayat (5) maka di tingkat kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat kota yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kota. Pembentukan TKPKD tingkat kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- 2) Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- 3) Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 4) Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik.
- 5) Pengendalian evaluasi pelaksana program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- 6) Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan.
- 7) Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada walikota dan TKPK Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dibantu oleh kelompok program yang terdiri dari: (i) Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; (ii) Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (iii) Penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kelompok Program bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta memberikan masukan dan pertimbangan bagi Komite Penanggulangan Kemiskinan.

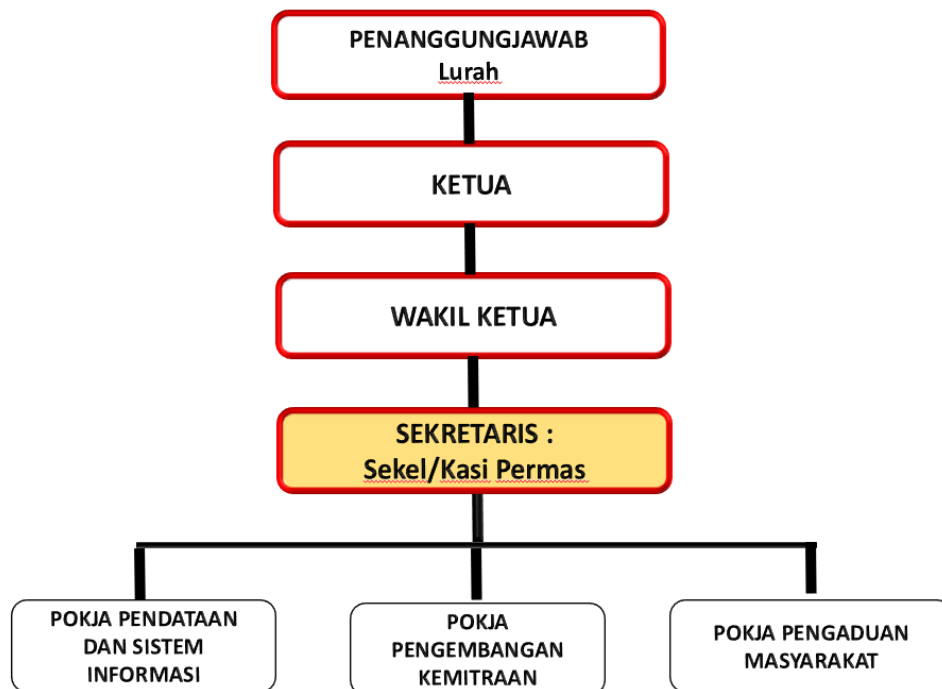
Dalam pelaksanaan tugas, Kelompok Program dibantu oleh Sekretariat. Peran dan tugas sekretariat ini adalah membantu dalam memantau pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan pencapaian tujuan, dan memberikan masukan penyempurnaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta melakukan koordinasi pemberian informasi, diseminasi, dan penanganan pengaduan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi sekretariat yang baik, sekretaris akan dibantu oleh: (i) Pokja Pendataan dan Sistem informasi; (ii) Pokja Pengembangan Kemitraan; (iii) Pokja Pengaduan Masyarakat; (iv) Sekretariat dalam hal ini akan dibantu satuan unit pelaksana harian.



Gambar 4.6 Struktur TKPKD Tingkat Kota

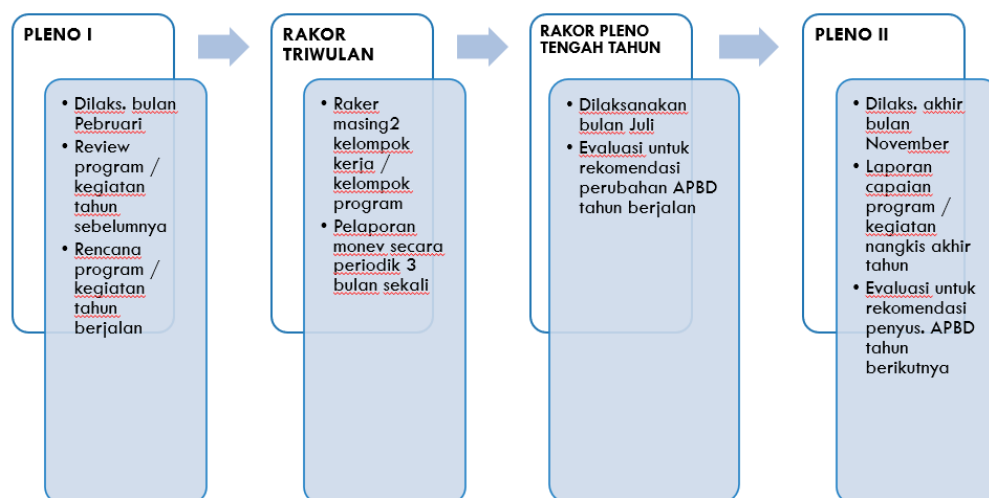
Sebagai upaya penyelarasan dan sinergitas program antar stake holder pembangunan di kota Surakarta, maka keanggotaan TKPKD selain dari SKPD (OPD) Pemerintah Kota Surakarta juga melibatkan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi (PT), organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional, dan pihak-pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan.

Konsep Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan Berbasis Kelurahan, maka dibutuhkan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan baik untuk melakukan pendataan, merancang intervensi kegiatan, monitoring dan pengendalian kegiatan serta melakukan pelayanan pengaduan masyarakat. Kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tiap kelurahan ini kemudian disebut Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK) yang akan menjadi mitra strategis dari TKPKD. Adapun ditingkat kecamatan dibentuk Forum TPKK yang beranggotakan para Ketua TPKK Kelurahan, yang akan mengkonsolidasikan baik data, Perencanaan Penanggulangan kemiskinan, Implementasi penanggulangan kemiskinan dan monitoring serta evaluasi penanggulangan kemiskinan yang akan dilaporkan di tingkat kota dalam hal ini TKPKD sebagai rujukan bahan rapat koordinasi yang dilakukan setiap Triwulan (3 bulan Sekali).



Gambar 4.7 Struktur Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK)

Adapun tahapan koordinasi di tingkat kota dilaksanakan setiap Triwulan dengan agenda pembahasan seperti digambarkan dalam tahapan rapat koordinasi dibawah ini :



Gambar 4.8 Tahapan Rapat Koordinasi TKPKD

4.3 KESIAPAN REGULASI PENDUKUNG KONSEP PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Hak-hak warga miskin yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah antara lain:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

Dengan melihat pada hak warga miskin yang harus dipenuhi, dalam Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melindungi dan mengupayakan terpenuhinya hak Warga Miskin
- b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- c. menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan;
- d. membangun kemitraan dengan pelaku usaha

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha. Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terpadu dengan kebijakan penanganan kemiskinan dari Pemerintah. Tahapan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendataan Warga Miskin
- b. Penetapan Warga Miskin
- c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Surakarta melakukan Penanggulangan Kemiskinan melalui :

1. Pengembangan potensi diri dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Warga Miskin yang bersifat perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar memiliki ketrampilan, mampu bekerja dan/atau berwirausaha.
2. Pemberian bantuan pangan dan sandang. Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyediaan bantuan pangan dan sandang yang layak bagi warga miskin.
3. Pemenuhan akses pelayanan perumahan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan akses pelayanan perumahan bagi Warga Miskin. Bentuk pemenuhan akses pelayanan perumahan berupa:

- a. Peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap rumah layak huni
 - b. bantuan perbaikan rumah
 - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
4. Penyediaan pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi Warga Miskin. Bentuk pelayanan kesehatan berupa:
- a. Pembebasan pembiayaan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut milik Pemerintah Daerah (RSUD) baik layanan rawat jalan maupun rawat inap.
 - b. pembebasan pembiayaan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut pada Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berupa layanan rawat inap.
5. Penyediaan pelayanan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Pembebasan seluruh biaya pendidikan bagi keluarga miskin dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan Menengah
 - b. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah
 - c. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa.
6. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha bagi Warga Miskin.
- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
 - b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
 - c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro
 - d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.
7. Penyediaan pelayanan sosial meliputi:
- a. Meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan;
- d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Adapun kebijakan lain yang merupakan turunan dari perda No. 11 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan kemiskinan, yang akan mendukung kerangka konsep dan implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta meliputi :

1. Perwali Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan
2. Perwali Nomor 4 Tahun 2018 Tentang tata kelola data kemiskinan & Direvisi menjadi Perwali Nomor Nomor : 13 tahun 2019. Salah satu perubahannya adalah mendata warga miskin non KTP Surakarta, pemakaian android untuk verifikasi dan kategorisasi kesejahteraan.
3. Perwali Nomor : 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan musrenbang Kota Surakarta, Dimana mengatur usulan kegiatan harus mengacu pada dokumen Rencana Strategis Masyarakat (RENSTRAMAS) Kelurahan.
4. Perwali Nomor : 27 Tahun 2019 tentang program pembebasan biaya pelayanan kesehatan (JKN-PBI) dimana kebijakan mengatur Universal health Coverage bagi masyarakat kota Surakarta baik miskin maupun tidak Miskin bagi yang mengajukan.

BAB V

TINJAUAN KESIAPAN DATA DAN TATA KELOLA DATA SEBAGAI SINGLE DATA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1 ARAH TATA KELOLA DATA BERBASIS KELUARGA

Strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan adalah pertama, mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin. Bentuk kebijakan riil yang ditempuh adalah dengan mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kedua, meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas bagi penduduk miskin agar memperoleh kesempatan dan hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik.

Strategi pemenuhan hak dasar untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dalam kajian TKPKD Kota Surakarta dibutuhkan data yang presisi dengan situasi lapangan serta identifikasi kebutuhan setiap keluarga miskin baik dalam satuan Rumah Tangga Sasaran (RTS), Kepala Keluarga (KK) maupun Anggota Rumah Tangga (ART) secara detail yang terkait dengan indikator kemiskinannya. Hal ini untuk mengantisipasi tingkat kekeliruan data serta ketidaktepatan program yang dibutuhkan keluarga miskin. Arah tata kelola data berbasis keluarga diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomer : 11 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan kemiskinan yang mengatur tata kelola data kemiskinan, yang tertuang dalam beberapa pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 10, “Pemerintah Daerah menentukan kriteria warga miskin berdasarkan Indikator Nasional dan Indikator lokal.”
- b. Pasal 11, yang meliputi ayat 1, 2, 3, 4 :
 1. Pendataan Warga Miskin dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kelurahan.

2. Daftar calon Warga Miskin sementara diperoleh dari :
 - Data program perlindungan sosial tahun terakhir dari Pemerintah
 - Data jumlah penduduk miskin yang ditetapkan Walikota tahun terakhir; dan
 - Usulan baru dari masyarakat melalui musyawarah berjenjang dari tingkat RT sampai Kelurahan.
 3. Daftar calon Warga Miskin sementara dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat.
 4. Daftar calon warga Miskin dilakukan pendataan dengan indikator yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
- c. Pasal 12, yang terdiri dari ayat 1, 2, 3, 4, 5 :
1. Daftar calon Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
 2. Data Warga Miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dengan keputusan walikota.
 3. Data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun untuk menentukan apakah tetap berstatus miskin atau sudah meningkat menjadi tidak miskin.
 4. Data Warga Miskin dikelola dengan sistem Informasi Penanggulangan kemiskinan.
 5. Data warga Miskin menjadi dasar penyusunan program Penanggulangan Kemiskinan.

Selanjutnya dari amanat Perda nomer 11 tahun 2014 tersebut, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan tata kelola data kemiskinan diatur dalam Perwali Nomor 4 Tahun 2018 Tentang tata kelola data kemiskinan dan Direvisi menjadi Perwali Nomor Nomor : 13 tahun 2019. Salah satu perubahannya adalah mendata warga miskin non KTP Surakarta, pemakaian android untuk verifikasi dan kategorisasi kesejahteraan.

Pemetaan masalah kemiskinan diawali dengan pendataan kondisi dan jumlah masyarakat miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang valid prasarat mutlak bagi pengambilan kebijakan untuk memperbaiki kondisi hidup orang miskin. Adapun tahapan yang dilaksanakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta meliputi beberapa langkah.

5.1.1 Pengembangan Indikator Kemiskinan

Basis data awal jumlah rumah tangga miskin/penduduk miskin menggunakan hasil pendataan BPS, pertama sekali data yang digunakan adalah Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) 2011 yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan 14 indikator. Dalam Perkembangannya BPS mengembangkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 dengan melakukan survey ke 40 % warga terendah di Kota/Kabupaten dengan parameter yang lebih detail meliputi :

a. Nama dan alamat kepala rumah tangga.

Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan rumah tangga by name by address, yang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

b. Keterangan perumahan

Informasi yang dikumpulkan mencakup status penguasaan bangunan, penguasaan lahan, luas lantai, jenis lantai, jenis dinding terluas, jenis atap terluas, sumber air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar/energi utama untuk memasak, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja dan jumlah kamar tidur.

c. Keterangan sosial-ekonomi anggota rumah tangga (ART)

Informasi yang termasuk kelompok ini antara lain: nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jumlah keluarga dalam satu rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, kecacatan, penyakit menahun/kronis, kehamilan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi.

d. Keterangan kepemilikan aset dan keikutsertaan program

Informasi yang dikumpulkan mencakup kepemilikan aset, usaha mikro yang dimiliki, dan keikutsertaan dalam berbagai program perlindungan sosial.

Dari parameter yang digunakan dalam PBDT 2015, pemerintah kota Surakarta menambahkan beberapa parameter untuk pendataan untuk semakin mendetailkan kebutuhan keluarga miskin dengan meminta input setiap SKPD (sekarang OPD) indikator yang perlu ditambahkan sesuai dengan layanan program tiap OPD.

5.1.2 Pengembangan Kategorisasi Kesejahteraan

Pemerintah Indonesia melakukan kategorisasi kesejahteraan mengambil 40 % yang terendah dari populasi rumah tangga yang berada di Indonesia dan kemudian dibagi kedalam desil 1 sampai dengan desil 4 lalu dirangking menjadi status kesejahteraan sebagai berikut :

1. Desil 1 yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan 10% terendah di Indonesia atau termiskin (Sangat Miskin).
2. Desil 2 yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11%-20% terendah di Indonesia (Miskin)
3. Desil 3 yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21%-30% terendah di Indonesia atau hampir miskin.
4. Desil 4 yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31%-40% terendah di Indonesia (Rentan Miskin)

Tidak diketahuinya rumus kategorisasi kesejahteraan berdasarkan indikator kemiskinan yang diterapkan Nasional, Pemerintah Kota Surakarta kemudian mengembangkan rumus kategorisasi

The diagram illustrates the SIAP (Sistem Informasi Akutik) system architecture and its output. On the left, a hierarchical structure shows the flow of information from the existing field conditions (Kondisi Eksisting Lapangan) through various levels of the organization (Rumah Tangga Sasaran, Kepala Keluarga, Anggota Rumah Tangga) to the SIAP system. The SIAP system is represented by a dashed red box containing the labels KK1, KK2, ART1.1, ART1.2, and ART2.1. An arrow points from the SIAP system to a funnel-shaped diagram on the right, which represents the distribution of the population. The funnel is divided into three segments: 20% for the main population (Indk. Penduk Ung), 70% for the main population (Indk. Utama), and 10% for the added population (Indk. Tambahan). An arrow points from the funnel to the label 'KELUARGA MISKIN' (Poor Family).

Adapun Detailing rumus kategorisasi kesejahteraan yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Surakarta terkait dengan Indikator, Bobot Indikator dan Variable untuk Menyusun data kemiskinan adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Prosentase Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
INDIKATOR UTAMA (BOBOT= 70%)	1	Jumlah Anggota Keluarga Non Produktif	1,52	
		Jumlahanggotakeluarga non produktif<=2		1
		Jumlahanggotakeluarga non produktif>2		2
	2	Pendapatan (Selisih pendapatan dengan pengeluaran)	1,52	
		Selisih >= 0 (Pengeluaran <= Pendapatan)		1

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Prosentase Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
		Selisih < 0 (Pengeluaran > Pendapatan)		2
	3	Lapangan Usaha	1,52	
		Selain Pertanian, Jasa, Pemulung, Lainnya		1
		Pertanian, Jasa, Pemulung, Lainnya		2
	4	Status Pekerjaan	1,52	
		Berusaha sendiri, Pns/Tni/Polri		1
		Buruh/Karyawan/Swasta, Pekerja Bebas Pertanian/ Non Pertanian, Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar		2
	5	Jenis Kelamin Kepala Keluarga	1,52	
		Laki-Laki		1
		Perempuan		2
	6	Status Perkawinan	1,52	
		Kawin		1
		Belum Kawin, Cerai Hidup, Cerai Mati		2
	7	Status Kepemilikan Tanah	1,52	
		Milik Sendiri		1
		Milik Orang Lain, Tanag Negara, Warisan		2
	8	Status Kepemilikan Bangunan	1,52	
		Milik Sendiri, Dinas		1
		Kontrak/Sewa, Bebas Sewa, Menumpang		2
	9	Luas Lantai Per Kapita	1,52	
		> 8 M ²		1
		<= 8 M ²		2
	10	Jenis Lantai	1,52	
		Marmes/Granit; Keramik, Parket/Vinil/Permadani, Ubin/Tegel/Teraso; Kayu/Papan Kualitas Tinggi		1
		Semen/Bata Merah; Bambu, Kayu/Papan Kualitas Rendah; Tanah		2
	11	Jenis Dinding	1,52	
		Tembok		1

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Prosentase Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
	12	Plesteran, Anyaman; Kayu; Anyaman Bambu; Batang Kayu; Bambu		2
		Penggunaan Fasilitas Tempat BAB	1,52	
		Sendiri, Bersama		1
		Umum; Tidak Ada		2
	13	Jenis Kloset	1,52	
		Leher Angsa		1
		Plengsengan; Cemplung/Cubluk; Tidak Ada		2
	14	Tempat Pembuangan Akhir Tinja	1,52	
		Tangki/Spal		1
		Lubang Tanah; Kolam/Sawah/Sungai/Da nau/Laut; Pantai/Tanah Lapang/Kebun		2
	15	Jumlah Penyandang Netra; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Keduanya;Tuna Wicara, Tuna Rungu, Plus Cacat Tubuh; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra Plus Cacat Tubuh	1,52	
		Jumlah Penyandang Netra; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Keduanya;Tuna Wicara, Tuna Rungu, Plus Cacat Tubuh; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra Plus Cacat Tubuh <=1		1
		Jumlah Penyandang Netra; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Keduanya;Tuna Wicara, Tuna Rungu, Plus Cacat Tubuh; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra Plus Cacat Tubuh >1		2
	16	Jumlah penyandang cacat mental retardasi, cacat fisik & mental	1,52	

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Prosentase Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
		Jumlah penyandang cacat mental retardasi, cacat fisik & mental ≤ 1		1
		Jumlah penyandang cacat mental retardasi, cacat fisik & mental > 1		2
	17	Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa	1,52	
		Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa ≤ 1		1
		Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa > 1		2
	18	Jumlah penderita Hipertensi, Reumatik, Asma	1,52	
		Jumlah penderita Hipertensi, Reumatik, Asma ≤ 1		1
		Jumlah penderita Hipertensi, Reumatik, Asma > 1		2
	19	Jumlah Penderita Penyakit Jantung	1,52	
		Jumlah Penderita Penyakit Jantung ≤ 1		1
		Jumlah Penderita Penyakit Jantung > 1		2
	20	Jumlah Penderita Diabetes	1,52	
		Jumlah Penderita Diabetes ≤ 1		1
		Jumlah Penderita Diabetes > 1		2
	21	Kepemilikan Asuransi Kesehatan	1,52	
		BPJS Mandiri; Jamsostek; Asuransi Kesehatan Lainnya		1
		Tidak Memiliki		2
	22	Kepemilikan Aset Bergerak	1,52	
		Kepemilikan Aset Bergerak $> 10.000.000$		1
		Kepemilikan Aset Bergerak $\leq 10.000.000$		2

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Prosentase Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
INDIKATOR PENDUKUNG (BOBOT= 20%)	23	Kepemilikan aset tidak bergerak/ternak	1,52	
		Memiliki		1
		Tidak Memiliki		2
	1	Ijazah tertinggi yang dimiliki	1,11	
		>= SLTA/Sederajat		1
		< SLTA/Sederajat		2
	2	Kemampuan Makan	1,11	
		Kemampuan Makan >2 Kali		1
		Kemampuan Makan <= 2 Kali		2
	3	Kemampuan membeli lauk pauk (ikan dan daging)	1,11	
		Mampumembeli lauk pauk (ikan dan daging)		1
		Tidak Mampu membeli lauk pauk (ikan dan daging)		2
	4	Sumber air minum utama	1,11	
		Air Kemasan Bermerk; Air Isi Ulang; Leding		1
		Sumur; Mata Air; Air Sungai; Air Hujan		2
	5	Cara memperoleh air minum	1,11	
		Membeli		1
		Tidak Membeli		2
	6	Sumber air minum non konsumsi	1,11	
		Air Kemasan Bermerk; Air Isi Ulang; Leding		1
		Sumur; Mata Air; Air Sungai; Air Hujan		2
	7	Daya Terpasang	1,11	
		>450 Watt		1
		<= 450 Watt		2
	8	Kemampuan berobatkeKlinik/RS	1,11	
		Mampu		1
		TidakMampu		2
	9	Kemampuan membeli 1 set pakaian	1,11	

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Prosentase Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
INDIKATOR TAMBAHAN (BOBOT= 10%)		Mampu		1
		Tidak Mampu		2
	1	Jenis Atap Terluas	1,67	
		Beton/Genteng; Genteng Keramik; Genteng Metal; Genteng Tanah Liat		1
		Asbes; Seng; Sirap; Bambu; Jerami; Ijuk; Rumbia; Daun		2
	2	Bahan Bakar Untuk Memasak	1,67	
		Listrik, Gas, Minyak Tanah		1
		Briket, Arang, Kayu Bakar, Tidak Memasak		2
	3	Kepersertaan KB	1,67	
		Ya		1
		Tidak		2

Dari penilaian setiap variabel yang digambarkan dalam tabel 5.1 dibagi ke dalam enam status kesejahteraan yang dikembangkan oleh pemerintah kota Surakarta, seperti digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 5.2 Pengelompokan Kategori kesejahteraan

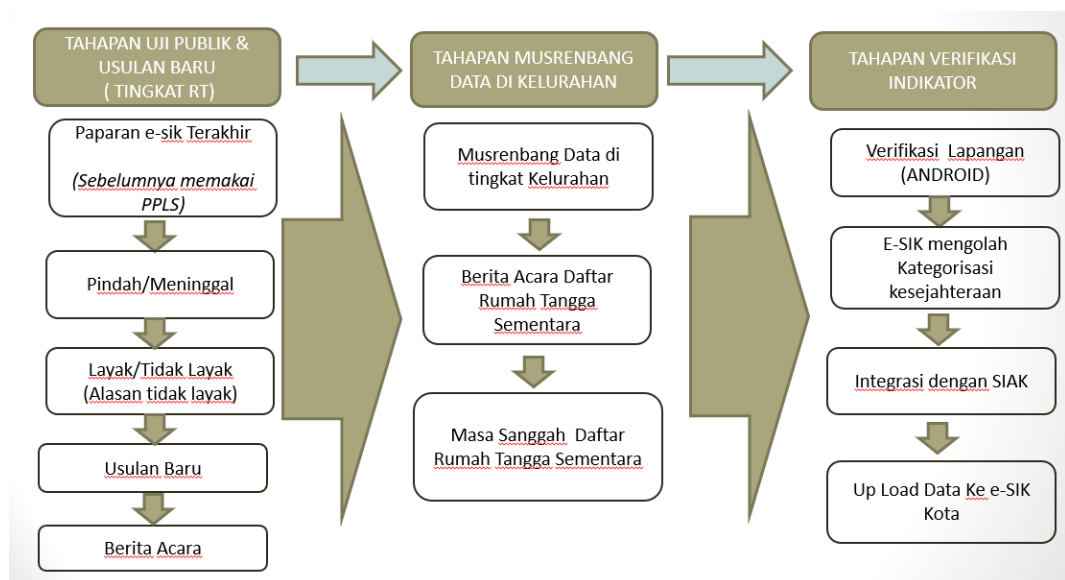
No	Kategori Kesejahteraan	Nilai
1	Prioritas 1	$80 \leq x \leq 100$
2	Prioritas 2	$75 \leq x \leq 80$
3	Prioritas 3	$70 \leq x \leq 75$
4	Prioritas 4	$65 \leq x \leq 70$
5	Prioritas 5	$60 \leq x \leq 65$
6	Prioritas 6	$55 \leq x \leq 60$

5.1.3 Pemetaan Rumah Tangga Miskin

Tingginya komplain masyarakat terkait dengan data warga miskin, dimana banyak masyarakat yang lebih miskin justru tidak menerima

layanan jaminan sosial. Hal ini berdampak menjadi kecemburuan yang besar di lapangan, di sisi lain warga yang miskin yang tidak terdata apabila belum dilakukan intervensi apapun akan muncul persoalan sosial dari dampak tekanan ekonomi baik pencurian, terjerat rentenir, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Sesuai dengan mandat perda penanggulangan kemiskinan, pemerintah kota Surakarta mengambil kebijakan mengembangkan data kemiskinan lokal yang akan di intervensi dengan APBD kota.

Metodologi pendataan yang dikembangkan adalah Participatory Poverty Assesment (PPA), dimana proses penentuan warga miskin dilakukan secara berjenjang di tingkat masyarakat melalui uji publik. Metode ini dikembangkan sebagai bentuk keyakinan bahwa yang mengetahui kehidupan sehari-hari dalam pemenuhan hak dasar khususnya beban pengeluaran adalah tetangganya, seringkali dalam penentuan keluarga miskin terjebak pada fisik rumah.



Gambar 5.2 Tahapan Pendataan Berbasis keluarga

5.1.4 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan

Manajemen tata kelola data kemiskinan di Kota Surakarta, dibuat dalam bentuk aplikasi berbasis web. Pertimbangan dalam pembuatan aplikasi berbasis web ini adalah sebagai berikut :

- a. Data kemiskinan yang dikembangkan merupakan paduan antara data nasional dan data lokal Kota Surakarta, dan menjadi single data kemiskinan yang akan menjadi pegangan seluruh stake holder pembangunan dalam menentukan sasaran dan program intervensi.
- b. Aplikasi berbasis web akan mempermudah distribusi data ke setiap OPD dengan pengaturan hak akses baik untuk membaca Rumah Tangga Sasaran, Kepala Keluarga Sasaran dan Anggota Rumah Tangga serta problematika yang dihadapi setiap individu miskin terkait dengan hak atas Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Permukiman dan infrastruktur pendukung kehidupan.
- c. Aplikasi berbasis web, akan mampu mengelola data secara realtime atas perubahan-perubahan variable kemiskinan, sehingga akan mempermudah memonitor perkembangan kesejahteraan setiap warga miskin.

Adapun fitur-fitur yang dikembangkan dalam aplikasi Sistem Informasi kesejahteraan dengan alamat di : <https://e-sik.surakarta.go.id> adalah sebagai berikut :

1. *Persebaran Kantong-Kantong Kemiskinan*

Fitur ini dikembangkan agar mempermudah menentukan lokasi percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan tingkat keparahan kemiskinan (P1 s/d P6) dan kantong-kantong kemiskinan baik jumlah Kepala keluarga dan Individu di masing-masing wilayah. Hal ini mempertimbangkan atas kemampuan APBD yang tidak memungkinkan melakukan serentak dalam melakukan intervensi.

Data Tabulasi Individu dan Keluarga Per Wilayah Periode **Semester II 2021**

WILAYAH	Prioritas 1		Prioritas 2		Prioritas 3		Prioritas 4		Prioritas 5		Prioritas 6		SUB TOTAL	
	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK
Kecamatan BANJARSARI	1,096	473	14,164	4,869	31,099	9,820	15,353	4,593	1,089	317	7	2	63,108	20,074
Kecamatan JEBRES	822	356	8,632	2,966	20,483	6,649	13,909	4,377	1,328	410	1	1	45,175	14,759
Kecamatan LAWLYAN	426	176	6,263	2,137	14,110	4,498	5,575	1,701	267	84	0	0	26,641	8,596
Kecamatan PASAR KLIWON	412	174	6,322	2,105	18,298	5,753	11,276	3,560	1,364	426	6	2	37,678	12,020
Kecamatan SERENGAN	260	121	3,955	1,397	8,883	2,831	4,594	1,461	421	127	5	2	18,118	5,939
Σ JUMLAH	3,016	1,300	39,636	13,474	92,873	29,551	50,707	15,692	4,469	1,364	19	7	190,720	61,388

Gambar 5.3 Persebaran Kantong-kantong kemiskinan di Kota Surakarta berbasis Kecamatan.

Data Tabulasi Individu dan Keluarga Per Wilayah Periode **Semester II 2021**

WILAYAH	Prioritas 1		Prioritas 2		Prioritas 3		Prioritas 4		Prioritas 5		Prioritas 6		SUB TOTAL	
	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK
Kelurahan GANDIKAN	167	77	1,592	539	2,188	734	516	170	25	8	0	0	4,488	1,528
Kelurahan JAGALAN	65	32	881	310	2,192	697	1,429	464	127	40	0	0	4,694	1,543
Kelurahan JEBRES	192	79	2,717	758	5,390	1,754	3,427	1,088	254	81	0	0	11,480	3,760
Kelurahan KEPATIHAN KULON	63	26	338	105	258	88	57	17	0	0	0	0	716	236
Kelurahan KEPATIHAN WETAN	21	7	164	60	314	96	122	37	4	2	0	0	625	202
Kelurahan MOJOSONGO	29	13	735	258	3,765	1,215	4,245	1,304	515	154	1	1	9,290	2,945
Kelurahan PUCANGSAWIT	29	16	702	250	2,638	854	2,527	791	293	89	0	0	6,189	2,000
Kelurahan PURWODININGRATAN	75	31	483	163	887	283	286	96	24	8	0	0	1,755	581
Kelurahan SEWU	74	34	627	225	1,630	518	768	246	60	20	0	0	3,159	1,043
Kelurahan SUDIROPRAJAN	91	35	584	189	542	177	164	59	11	3	0	0	1,392	463
Kelurahan TEGALHARJO	16	6	309	109	679	233	368	105	15	5	0	0	1,387	458
Σ JUMLAH	822	356	8,632	2,966	20,483	6,649	13,909	4,377	1,328	410	1	1	45,175	14,759

Gambar 5.4 Persebaran Kantong-kantong kemiskinan di Kota Surakarta berbasis Kelurahan dalam satu Kecamatan.

Data Tabulasi Individu dan Keluarga Per Wilayah Periode **Semester II 2021**

WILAYAH	Prioritas 1		Prioritas 2		Prioritas 3		Prioritas 4		Prioritas 5		Prioritas 6		SUB TOTAL	
	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK
RW 01	0	0	11	5	110	38	60	15	7	3	0	0	188	61
RW 02	9	2	14	8	163	58	150	44	8	2	0	0	344	114
RW 03	1	1	79	29	176	63	99	29	0	0	0	0	355	122
RW 04	0	0	6	3	47	17	30	9	0	0	0	0	83	29
RW 05	3	1	115	39	72	23	14	4	0	0	0	0	204	67
RW 06	3	2	84	25	111	34	15	4	0	0	0	0	213	65
Σ JUMLAH	16	6	309	109	679	233	368	105	15	5	0	0	1,387	458

Gambar 5.5 Persebaran Kantong-kantong kemiskinan di Kota Surakarta berbasis RW dalam satu Kelurahan.

Data Tabulasi Individu dan Keluarga Per Wilayah Periode **Semester II 2021**

WILAYAH	Prioritas 1		Prioritas 2		Prioritas 3		Prioritas 4		Prioritas 5		Prioritas 6		SUB TOTAL	
	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK	IDV	KK
RT 01	0	0	32	11	32	9	0	0	0	0	0	0	64	20
RT 02	0	0	15	6	22	6	0	0	0	0	0	0	37	12
RT 03	0	0	3	2	3	1	8	2	0	0	0	0	14	5
RT 04	1	1	19	5	34	12	10	3	0	0	0	0	64	21
RT 05	0	0	1	1	8	5	26	8	0	0	0	0	35	14
RT 06	0	0	0	0	5	2	7	2	0	0	0	0	12	4
RT 07	0	0	2	1	22	9	24	7	0	0	0	0	48	17
RT 08	0	0	5	2	42	16	4	2	0	0	0	0	51	20
RT 09	0	0	2	1	8	3	20	5	0	0	0	0	30	9
Σ JUMLAH	1	1	79	29	176	63	99	29	0	0	0	0	355	122

Gambar 5.6 Persebaran Kantong-kantong kemiskinan di Kota Surakarta berbasis RT dalam satu RW Kelurahan.

2. Variabel kemiskinan berbasis RTS dan KK

Fitur ini dikembangkan untuk memotret persoalan-persoalan kemiskinan berdasarkan kebutuhan atau persoalan yang dihadapi sebuah rumah tangga miskin. Adapun variabel yang dikembangkan adalah informasi terkait dengan variabel **1. Perumahan** (*status tempat tinggal, status lahan, IMB, Jenis lantai, dinding, atap beserta kondisinya*) **2. Sarana Prasarana Rumah** (*sumber air minum konsumsi dan non konsumsi, sumber penerangan dan daya, bahan bakar memasak, Fasilitas BAB, jenis kloset, Kepemilikan IPAL, lubang cahaya dan ventilasi rumah*), **3. Kepemilikan asset** (*televisi, telp, Ac, sepeda, motor dll*), **4. Rumah Tangga yang mendapatkan program kartu perlindungan sosial** (*KKS, BPNT, KIS, PKH*), **5. Kesehatan** (*kepersetaan KB, metode kontrasepsi, tempat pelayanan KB, keinginan punya anak lagi, alasan tidak KB*), **6. Ketahanan ekonomi keluarga** (*kemampuan berobat, kemampuan beli pakaian, kemampuan beli daging, kemampuan makan dalam sehari*). Setiap indikator bisa dipanggil dalam bentuk By Name By Address (BNBA), maupun bisa ditampilkan keseluruhan indikator dalam keluarga tersebut.

Fitur ini dilakukan recording setiap 6 bulan sekali perubahannya, hal ini untuk mempermudah pemantauan perkembangan keluarga miskin dan perubahan-perubahan variabel kemiskinan secara periodik. Setiap perubahan variabel akan mempengaruhi kategorisasi kesejahteraan (P1-P6) yang berada di fitur kategorisasi kesejahteraan secara otomatis berdasarkan rumus yang sudah ditetapkan.

Data Berbasis Indikator Rumah Tangga Sasaran							
		Indikator	Σ Responden		Semester I 2022	Semester II 2021	Semester I 2021
			Semester I Tahun 2023	Semester II Tahun 2022			
No							
KETERANGAN PERUMAHAN							
1.1.a		Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal					
		1 - Milik Sendiri	37	26,377	26,047	23,978	22,326
		2 - Kontrak/Sewa	72	8,863	8,609	8,051	7,316
		3 - Bebas Sewa	32	6,416	5,989	5,494	5,007
		4 - Dinas	0	260	257	247	219
		5 - Menumpang	187	27,396	26,062	23,409	20,870
1.1.a_		Atas Nama siapakah?					
1.1.b		Status Lahan Tempat Tinggal					
		1 - Milik Sendiri	45	20,563	20,316	18,666	17,462
		3 - Tanah Negara	53	7,284	7,230	6,816	6,408
		2 - Milik Orang Lain	161	18,890	18,140	16,593	14,994
		4 - Tanah Warisan	69	22,544	21,247	19,070	16,841

Gambar 5.7 Variabel Kemiskinan Berdasarkan Rumah Tangga sasaran (RTS).

3. Variabel kemiskinan berbasis ART

Fitur ini dikembangkan untuk memotret persoalan-persoalan kemiskinan berdasarkan kebutuhan atau persoalan yang dihadapi setiap individu miskin baik sebagai kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga. Adapun variabel yang dikembangkan adalah

informasi terkait dengan variabel **1. Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga** (*istri, anak, menantu cucu dll*), **2. Status** (*Laki/perempuan, perkawinan, kepemilikan akta nikah dan kartu identitas*) **3. Kesehatan** (*jenis disabilitas, Penyakit kronis, kehamilan*), **4. Pendidikan** (*Partisipasi sekolah, jenjang sekolah, kelas tertinggi, ijazah yang dimiliki dll*), **5. Ekonomi** (*Lapangan pekerjaan, status kedudukan dalam pekerjaan, penghasilan, kebutuhan penguatan kapasitas*). Setiap indikator bisa dipanggil dalam bentuk By Name By Address (BNBA), maupun bisa ditampilkan keseluruhan indikator dalam keluarga tersebut.

Fitur ini dilakukan recording setiap 6 bulan sekali perubahannya, hal ini untuk mempermudah pemantauan perkembangan keluarga miskin dan perubahan-perubahan variabel kemiskinan secara periodik. Setiap perubahan variabel akan mempengaruhi kategorisasi kesejahteraan (P1-P6) yang berada di fitur kategorisasi kesejahteraan secara otomatis berdasarkan rumus yang sudah

Indikator Anggota Rumah Tangga

No	Indikator	Semester I Tahun 2023	Semester II Tahun 2022	Semester I 2022	Semester II 2021	Semester I 2021
11	Jenis Cacat					
00	Tidak Cacat	1,138	210,834	201,761	186,448	169,472
01	Tuna Daksa / Cacat Tubuh	4	823	796	744	685
02	Tuna Netra / buta	0	233	242	232	218
03	Tuna Rungu	1	276	288	275	249
04	Tuna Wicara	0	142	136	124	119
05	Tuna Rungu dan Wicara	1	106	102	99	93
06	Tuna Netra dan Cacat Tubuh	0	29	29	26	25
07	Tuna Netra, Rungu dan Wicara	0	15	16	16	15
12	Penyakit Kronis/Menahun					
0	Tidak Ada	1,058	199,080	190,261	175,912	159,722
1	Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	33	4,303	4,079	3,698	3,390
2	Rematik	6	983	976	898	826
3	Asma	12	1,253	1,224	1,135	1,012
4	Masalah Jantung	13	1,409	1,366	1,241	1,140
5	Diabetes	9	2,303	2,288	2,102	1,943
6	Tuberculosis	3	124	118	110	99
7	Stroke	3	1,507	1,554	1,466	1,397

Gambar 5.8 Variabel Kemiskinan Berdasarkan Anggota Rumah Tangga (ART).

4. Fitur Olah Data Query RTS

Fitur Query RTS adalah fitur yang digunakan untuk mengolah atau memfilter gabungan 2 indikator atau lebih untuk variabel Rumah Tangga Sasaran. Dalam menentukan kelompok sasaran beberapa kebijakan program memiliki prasyarat yang harus dipenuhi oleh keluarga calon penerima program, misalkan : untuk mendapatkan bantuan Rumah tidak layak Huni (RTLH) prasyaratnya adalah variabel dinding bambu, lantai tanah, status lahan milik sendiri, maka 3 variabel tersebut akan menjadi alat saring untuk menemukan keluarga miskin yang memenuhi 3 syarat tersebut. Data langsung berbasis By Name by Address.

Sistem Informasi Capaian Kesejahteraan Pemanggilan Data Keluarga Tersesuaian

Dashboard Pemanggilan Data Keluarga Tersesuaian

Pemanggilan Parameter Indikator

Pilih Periode Data

Semester I Tahun 2023

KETERANGAN PERUMAHAN

1.a. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

☐ Milik Sendiri
☐ Kontrak/Sewa
☐ Bebas Sewa
☐ Dinas
☐ Menumpang

KETERANGAN PERUMAHAN

1.a. Atas Nama siapakah?

Nilai Minimal ($\geq$)

Nilai Maksimal ($\leq$)

KETERANGAN PERUMAHAN

1.b. Status Lahan Tempat Tinggal

☐ Milik Sendiri
☐ Tanah Negara
☐ Milik Orang Lain
☐ Tanah Warisan

KETERANGAN PERUMAHAN

4.c. Kondisi dinding

☐ Kondisi Baik
☐ Rusak Sedang/Sebagian
☐ Rusak Ringan
☐ Rusak Berat/Seluruhnya

KETERANGAN PERUMAHAN

5.a. Jenis Atap Terluas

☐ Beton/Genteng Beton
☐ Genteng Keramik
☐ Genteng Metal
☐ Genteng Tanah Liat
☐ Asbes
☐ Seng
☐ Sirap
☐ Bambu
☐ Jerami/ijuk/daun2an/Lumbia

KETERANGAN PERUMAHAN

5.b. Kualitas atap

☐ Kualitas Tinggi
☐ Kualitas rendah

Gambar 5.9 Fitur olah Query Rumah Tangga Sasaran

5. Fitur Olah Data Query ART

Fitur Query ART adalah fitur yang digunakan untuk mengolah atau memfilter gabungan 2 indikator atau lebih untuk variabel Anggota Rumah Tangga. Dengan fitur ini, mampu mendeteksi kelompok-kelompok miskin inklusi yang butuh intervensi segera. OPD akan mampu mendiagnose data kemiskinan untuk menentukan kelompok sasaran intervensi, dengan pendekatan individu miskin. Misalkan : mencari data anak usia sekolah tidak sekolah umur 7 tahun sampai 18 tahun dengan jenis kelamin perempuan, data akan memfilter individu yang memenuhi syarat dari indikator yang digabungkan tersebut.

The screenshot displays the 'Fitur Olah Data Query ART' interface. At the top, there is a dropdown menu for 'Pilih Periode Data' set to 'Semester 1 Tahun 2023'. Below this, there are 12 filter panels arranged in a 4x3 grid, each titled 'Data Individu/Anggota Rumah Tangga'.

- 3. Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga:** Includes checkboxes for 'Kepala Rumah Tangga', 'Istri/istri', 'Anak', 'Menantu', 'Cucu', 'Orang tua/ibu/tant', 'Pembantu rumah', and 'Lainnya'.
- 4. Nomor Urut Keluarga:** Includes input fields for 'Nilai Minimal (<=)' and 'Nilai Maksimal (<=)'.
- 5. Hubungan dengan Kepala:** Includes checkboxes for 'Kepala keluarga', 'Istri/istri', 'Anak', 'Menantu', 'Cucu', 'Orang tua/ibu/tant', 'Pembantu rumah', and 'Lainnya'.
- 6. Jenis Kelamin:** Includes checkboxes for 'Laki-laki' and 'Perempuan'.
- 7. Umur (tahun) saat pendaftaran:** Includes input fields for 'Nilai Minimal (<=)' and 'Nilai Maksimal (<=)'.
- 8. Status Perkawinan:** Includes checkboxes for 'Belum kawin', 'Kawin/ menikah', 'Cerai hidup', and 'Cerai mati'.
- 12. Status Kehamilan (utk wanita usia 10-49 thn):** Includes checkboxes for 'Ya' and 'Tidak'.
- 13. Jenis Cacat:** Includes checkboxes for 'Tidak Cacat', 'Tuna Daksa / Cacat Tubuh', 'Tuna Netra / buta', 'Tuna Rungu', 'Tuna Wicara', 'Tuna Rungu dan Wicara', 'Tuna Netra dan Cacat Tubuh', 'Tuna Netra, Rungu dan Wicara', 'Tuna Rungu, Wicara dan Cacat Tubuh', 'Tuna Rungu, Wicara, Netra, dan Cacat Tubuh', 'Cacat Mental Retardasi', 'Mantan Penderita Gangguan Jiwa', and 'Cacat Fisik dan Mental'.
- 14. Penyakit Kronis/Menahun:** Includes checkboxes for 'Tidak Ada', 'Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi', 'Rematik', 'Asma', 'Masalah Jantung', 'Diabetes', 'Tuberculosis', 'Stroke', 'Kanker atau Tumor ganas', and 'Lainnya (Gagal ginjal, Paru-paru flex dan sejenisnya)'.

Gambar 5.10 Fitur olah Query Anggota Rumah Tangga (ART)

6. Fitur Program Bantuan

Fitur ini didesain agar Pemerintah kota mampu melakukan monitoring setiap intervensi yang diberikan baik pada keluarga maupun anggota

individu, baik yang dilakukan oleh pemerintah Nasional, Propinsi dan kota Surakarta. Fitur ini akan mampu melihat jenis intervensi yang diperoleh masyarakat dan tidak terjadi duplikasi bantuan.

#	Nama Program	Pelaksana/Pemilik Program	Periode/Masa Berlaku	Σ Penerima Manfaat	Status	
1	Kartu Indonesia Pintar	Dinas Sosial	1 Jan - 30 Jun 2017	22,035	Telah diarsipkan	
2	BPJS APBN	Dinas Sosial	1 Jan - 30 Jun 2017	108,723	Baru	
3	BPJS APBD	Dinas Sosial	1 Jan - 30 Jun 2017	29,167	Baru	
4	RASKIN	Dinas Sosial	1 Jan - 30 Jun 2017	96,422	Baru	
5	RASKINDA	Dinas Sosial	1 Jan - 30 Jun 2017	21,085	Baru	
6	KKS	Dinas Sosial	1 Jan - 30 Jun 2017	70,590	Baru	
7	Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	1 Jan - 30 Jun 2017	131	Baru	
8	RTLH	Kantor Pengelolaan Pasar	1 Jan - 30 Jun 2017	158	Baru	

Gambar 5.11 Fitur Program Bantuan

5.2 ARAH TATA KELOLA DATA BERBASIS SPASIAL/LINGKUNGAN

Salah satu strategi pemerintah Kota Surakarta untuk menekan angka kemiskinan melalui pendekatan berbasis spasial atau lingkungan. Dalam kajian yang dilakukan persoalan kemiskinan bukan hanya persoalan yang terkait dengan pendapatan saja, tetapi juga ketidakmampuan yang menghambat warga miskin, hampir, rentan miskin dalam melakukan proses berusaha dan meningkatkan kapasitas diri karena karena minimnya daya dukung lingkungannya. Akibat terbatasnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terpaksa menempati rumah yang tidak sehat dimana kondisi lingkungannya rawan terhadap bencana alam, bencana sosial maupun rentan endemik merupakan pemicu utama proses pemiskinan

Pendekatan ini juga sebagai upaya mengurangi kerentanan dan kerawanan munculnya warga miskin baru, akibat dari lingkungan yang bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan. Persoalan lingkungan baik dari sisi kesehatan

wilayah endemik DB, sanitasi yang buruk, kantong banjir, rawan kebakaran, kurangnya lahan bermain anak dan lain-lainya bisa menjadi salah satu pemicu penyebab masyarakat menjadi miskin atau dengan kata lain beban masyarakat akan semakin berat karena lingkungan yang tidak sehat yang akan berdampak pada beban pengeluaran yang tinggi akibat sakit, tidak bisa bekerja karena banjir dan lain sebagainya. Persoalan lingkungan yang buruk bisanya banyak terjadi pada lokasi kantong-kantong kemiskinan.

Data berbasis spasial ini kemudian disebut Rencana Strategis Masyarakat (RENSTRAMAS) Kelurahan, yang kemudian diatur sebagai acuan untuk proses perencanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel). Adapun kebijakan RENSTRAMAS diatur dalam Peraturan Daerah Nomer : 11 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan kemiskinan yang mengatur dokumen RENSTRAMAS, yang tertuang dalam beberapa pasal Pasal 1 ayat 19, "Rencana Strategis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Renstra Masyarakat adalah Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemangku kepentingan kelurahan sebagai rancangan pembangunan 5 (lima) tahun di bidang penanggulangan kemiskinan.

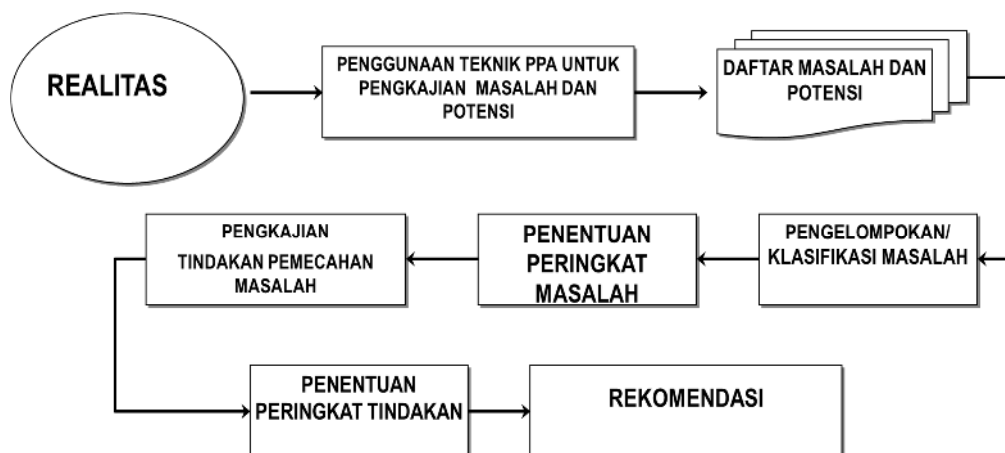
Selanjutnya dari amanat Perda nomer 11 tahun 2014 tersebut, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan integrasi Renstramas dengan proses musrenbang diatur dalam Perwali Nomor : 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta, dimana mengatur usulan kegiatan harus mengacu pada dokumen RENSTRAMAS Kelurahan.

5.2.1 Pengembangan Metodologi Pemetaan Masalah

Pemerintah kota Surakarta telah melakukan evaluasi berkali-kali terkait dengan proses-proses musrenbang yang dijalankan setiap

tahun. Beberapa evaluasi menemukan, sistem perencanaan pembangunan di kelurahan yang tidak berkelanjutan karena lemahnya analisa hubungan sebab akibat dari setiap masalah. Hal ini berdampak pada usulan musrenbangkel lebih banyak didasarkan pada keinginan bukan kebutuhan untuk menjawab masalah yang dihadapi masyarakat. Di sisi lain lemahnya usulan masyarakat juga berdampak pada banyak SKPD (OPD) yang belum mengadopsi Rencana Kerjanya bersumber dari hasil musrenbangkel.

Dibutuhkan upaya pemetaan setiap masalah di kelurahan dan meletakkan proporsi yang benar tentang konsistensi antara Perencanaan, strategi, program, penentuan sasaran agar persoalan masyarakat bisa diselesaikan khususnya daya dukung untuk kepentingan warga miskin.



Gambar 5.12 : Alur Penggalan Masalah berbasis Lingkungan

Upaya Pemerintah kota Surakarta untuk memotret realitas persoalan lapangan, dilakukan proses pemetaan dengan pengembangan metodologi participatory Poverty Assesment (PPA) atau Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP). Metodologi PPA merupakan suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis dan meningkatkan pengetahuan tentang kehidupan serta kondisi masyarakat

sebagai dasar dalam membuat perencanaan dan aksi tindak terhadap perencanaan pelibatan masyarakat secara aktif. PPA juga sebagai instrumen memasukkan pandangan masyarakat di lingkungannya yang akan mampu mengidentifikasi permasalahan dan penyebab terjadinya permasalahan tersebut serta teridentifikasi alternatif tindakan dan indikator penyelesaian masalah lingkungannya. Adapun beberapa alat yang digunakan dalam PPA adalah :

TOOLS/METODE YANG DIGUNAKAN	INFORMASI YANG AKAN DIPEROLEH
Pemetaan Sosial	• Mengetahui Struktur masyarakat dalam satu komunitas • Keberadaan asset ekonomi, social, fisik, ekonomi dan Sumberdaya Manusia • Lokasi dan kantong-kantong masalah (kemiskinan) serta faktor penyebabnya
Analisa Sebab Akibat	• Data tentang persepsi masyarakat mengenai sebab permasalahan serta akibatnya • Menggambarkan factor-faktor atau kejadian spesifik seperti banjir, kebakaran, kekerasan, konflik, guncangan ekonomi dsb.
Trend Analisis	• Mengatahui kejadian masa lalu dalam rangka memprediksi kejadian pada masa yang akan datang • Mengetahui hubungan sebab akibat dan mengetahui faktor yang paling mempengaruhi fenomena/masalah • Memperkirakan arah kecenderungan umum dalam jangka panjang serta mampu mengantisipasi kecenderungan tersebut.
Bagan Hubungan Kelembagaan	• Keterkaitan lembaga yang diketahui masyarakat dengan kehidupan masyarakat • Peran lembaga terhadap setiap proses kehidupan masyarakat sehari-hari • Fungsi lembaga tersebut bagi kelompok/masyarakat miskin

5.2.2 Kajian Kemiskinan Berbasis Spasial/Lingkungan

Proses pelaksanaan PPA dilakukan proses identifikasi masalah dan melakukan analisis hubungan sebab akibat dilakukan di setiap Rukun Warga (RW) dengan menggunakan sketsa kelurahan dan analisa sebab akibat. Adapun jenis Informasi yang dicari dari analisa bersama masyarakat, fokus pada pola-pola yang mempengaruhi kehidupan warga serta strategi untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan munculnya warga miskin baru serta strategi untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Adapun tahapan proses PPA adalah sebagai berikut :

a. Pemetaan masalah di tingkat RW

Ditahap awal proses pemetaan masalah dilakukan pada lingkungan di tingkat Rukun Warga (RW) dan peserta merupakan utusan dari Rukun Tetangga di RW tersebut. Adapun topik yang dibahas dalam pemetaan meliputi : Topik Kesehatan, Infrastruktur, Pendidikan, Ekonomi dan permukiman. Setiap kelompok isu akan dibekali dengan data sekunder salah satunya yang bersumber dari data Sistem Informasi Kesejahteraan diantaranya jumlah warga miskin, anak usia sekolah tidak sekolah, disabilitas, jumlah balita dan lansia miskin, kepala rumah tangga perempuan dan informasi kuantitatif lainnya. Selain dibekali dengan data-data kuantitatif, proses PPA RW menggunakan peta untuk menggambarkan letak lokasi masalah.

HASIL PEMETAAN MASALAH DAN DAFTAR SKALA PRIORITAS
TINGKAT RW TAHUN 2016 - 2021
RW KELURAHAN

Topik/Aspek :

NO	MASALAH	LOKASI MASALAH	VOLUME SASARAN	MENGAPA MASALAH TERSEBUT TERJADI	DAMPAK MASALAH	UPAYA YANG PERNAH DILAKUKAN	ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH	DSP
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Gambar 5.13 :Tabel Form PPA di tingkat RW

Seluruh data temuan PPA di tingkat RW kemudian dikompilasikan menjadi satu dokumen untuk dibahas di tingkat Kelurahan oleh tim perumus.

Topik /Aspek :									
Uraian	RW 1	RW 2	RW 3	RW 4	RW 5	RW 6	RW 7	RW 8	RW dst
Masalah									
Lokasi Masalah									
Mengapa Masalah tersebut terjadi									
Prakiraan Volume									
Dampak Masalah									
Upaya yang Pernah dilakukan									
Alternatif Pemecahan Masalah									

Gambar 5.14 : Tabel Kompilasi Hasil PPA tiap RW

b. Merunut masalah

Di tingkat kelurahan dibuat tim perumus yang merupakan gabungan dari lembaga kemasyarakatan kelurahan dan utusan RW. Tim perumus akan melakukan kajian hubungan masalah antara RW satu dengan RW yang lainnya khususnya aspek jalan dan drainase. Metode yang digunakan selain mengurutkan masalah dalam satuan bagian masalah, juga dilakukan analisa kecenderungan atas dampak yang terjadi. Metode ini mampu memberikan gambaran

pada masyarakat tahapan penyelesaian drainase dan jalan mana yang terlebih dahulu.

HASIL IDENTIFIKASI MERUNUT MASALAH SELOKAN/DRAINASE & Ruas Jalan
DAN DAFTAR SKALA PRIORITAS TAHUN 2016 – 2021
KELURAHAN

No	Lokasi aliran selokan	Masalah	Lokasi Masalah (RT/RW)	Volume	Mengapa masalah tersebut terjadi	Dampak Masalah	Upaya yang pernah dilakukan	Alternatif pemecahan masalah	Urutan Penyelesaian Masalah	Skala Prioritas

Gambar 5.15 : Tabel Merunut Masalah

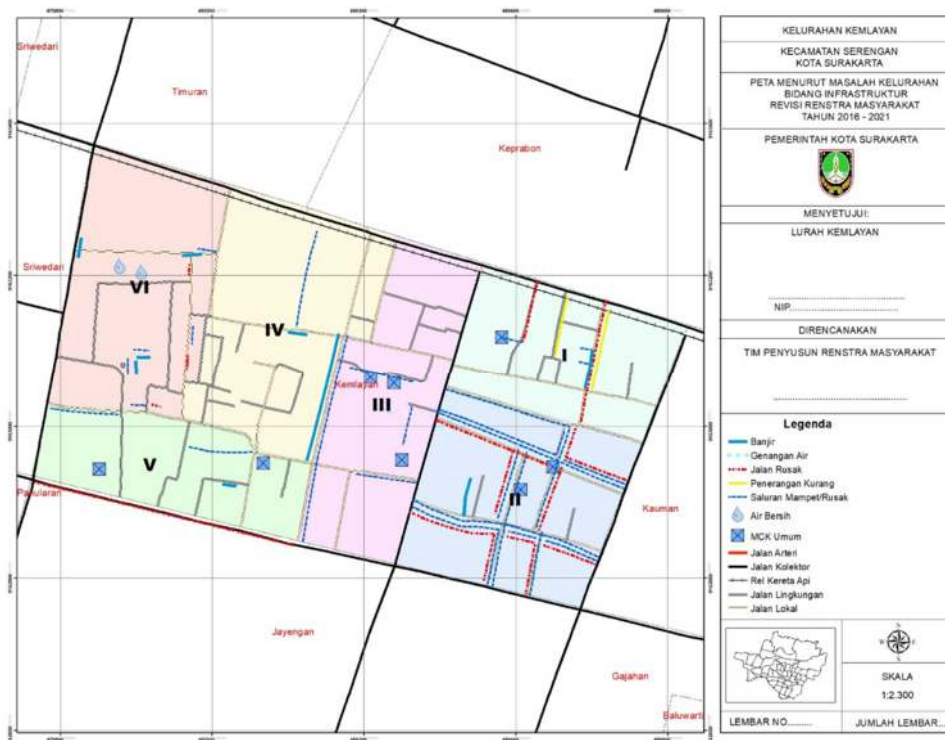
c. Perumusan Dokumen Renstramas

Hasil akhir dari dokumen PPA RW dan merunut masalah menjadi dokumen final Matrik Rencana Strategis Masyarakat (RENSTRAMAS) yang akan menjadi prioritas pembangunan selama 5 tahun kelurahan. Yang terbagi dalam 5 bidang. Salah satu metode yang digunakan untuk matrik renstramas ini adalah analisa bagan hubungan kelembagaan, terkait dengan menentukan pelaksana kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI kelembagaan yang ada di kelurahan.

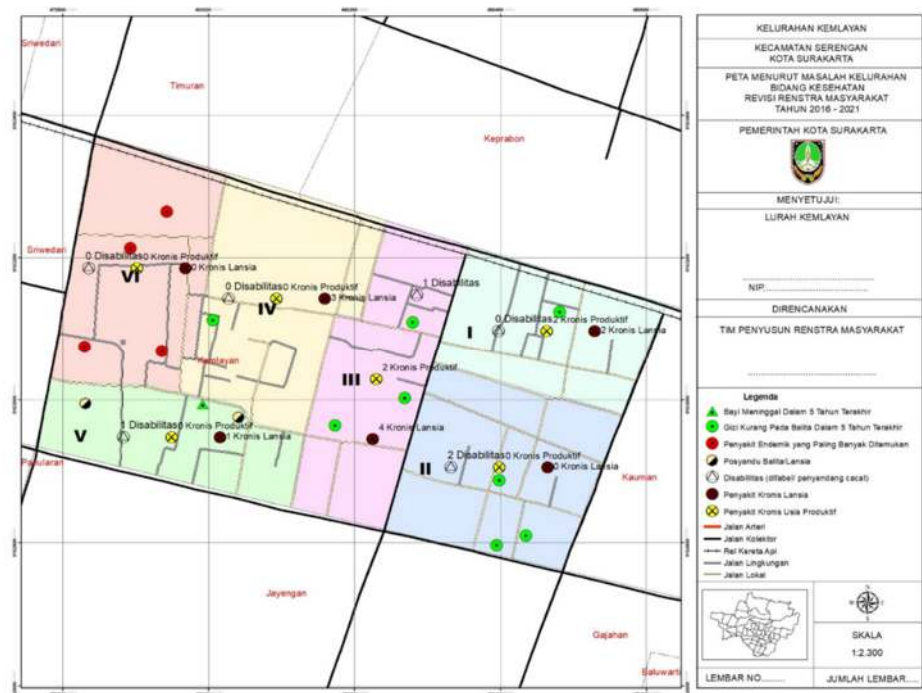
NO	BIDANG	URUTAN	MASALAH	URUTAN PEMECAHAN	VOLUME	PRIORITAS	Tahun Pelaksanaan dari tahun anggaran setelah diangkatnya pejabat	REKOR
1	PERENCANAAN							
2	PELAKSANAAN							
3	PEMERIKSAAN, MONITORING DAN EVALUASI							
4	PERHUBUNGAN							
5	KEBERSIHAN							

Gambar 5.16 : Tabel Matrik Kegiatan Renstramas

Selain matrik rencana kerja, dokumen renstramas dilengkapi dengan peta-peta hasil pemetaan di 5 isu yaitu Kesehatan, Infrstruktur, Pendidikan, Ekonomi dan permukiman untuk mempermudah membaca dimana lokasi-lokasi masalah dan potensi di kelurahan.



Gambar 5.17 : Contoh hasil akhir Peta Infrastruktur Renstramas



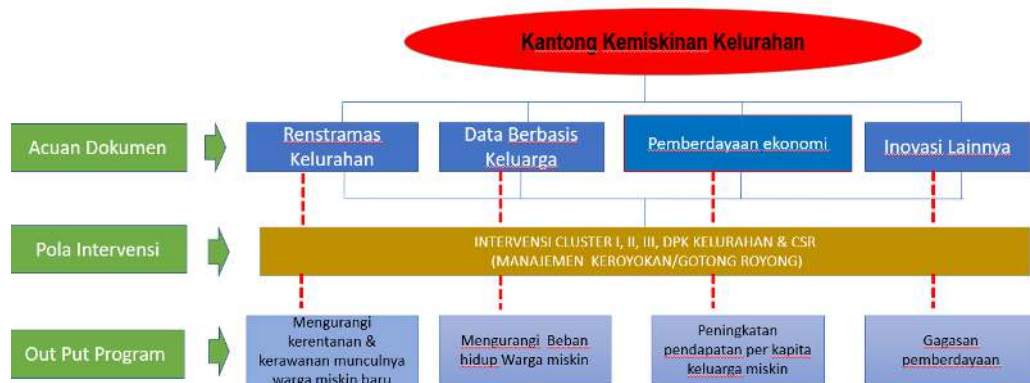
Gambar 5.18 : Contoh hasil akhir Peta Kesehatan Renstramas

BAB VI

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

6.1 STRATEGI MEMBANGUN SINERGITAS ANTAR STAKE HOLDER PEMBANGUNAN

Salah satu peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2015, adalah membangun sinergitas antar stake holder pembangunan dalam implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan dari berbagai bidang/ sektor (OPD). Untuk meningkatkan akselerasi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, dikembangkan model program pembangunan secara manajemen gotong royong atau *keroyokan* antar stake holder yang di implementasikan pada kantong-kantong kemiskinan di lingkup kelurahan.



Gambar 6.1 : Kerangka Operasional penggunaan dokumen kesejahteraan dan renstramas kelurahan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan

Untuk mencapai sinergitas antar stake holder, kebutuhan data yang presisi dengan kondisi riil tiap kelurahan sangat dibutuhkan, sehingga setiap intervensi yang dijalankan akan tepat sasaran dan tepat program. Pemerintah Kota Surakarta mengambil kebijakan memperluas cakupan penerima

manfaat bukan hanya pada kelompok miskin saja tetapi dikembangkan dengan kelompok hampir miskin, Rentan miskin dan rentan sosial ekonomi. Strategi ini sebagai upaya mencegah kelompok yang belum miskin, tidak akan mudah bergeser ke kelompok miskin apabila terjadi guncangan baik karena krisis ekonomi, politik, bencana wabah dan lain sebagainya. Dokumen ini diolah ke dalam sistem informasi kesejahteraan atau Data berbasis keluarga.

6.1.1 Sinergitas antar stake holder dengan basis Data keluarga

Kebutuhan intervensi dari setiap keluarga miskin, hampir miskin, rentan miskin dan rentan sosial ekonomi akan berbeda-beda kebutuhannya. Pengembangan variable kemiskinan di sistem informasi kesejahteraan akan mampu menerjemahkan peran setiap OPD dilihat dari, antara variabel kemiskinan dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing dinas. Strategi ini akan semakin memberikan gambaran peran setiap OPD bisa memberikan kontribusi intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya dalam 4 pilar untuk tercapainya kesejahteraan yaitu, penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, serta peningkatan upaya perlindungan sosial.

6.1.2 Sinergitas antar Stake holder dengan data berbasis Spasial (Renstramas)

Selain pendekatan berbasis keluarga pemerintah kota Surakarta juga mengembangkan dokumen berbasis spasial atau berbasis lingkungan, yang diharapkan akan mencegah munculnya warga miskin baru akibat dari persoalan lingkungan seperti kebakaran, banjir, endemik dan lain sebagainya. Dokumen ini yang dikelola dalam Renstramas kelurahan.

Selain data-data yang bersifat kualitatif terkait dengan persoalan lingkungan, didalam analisanya juga sudah dilengkapi dengan data variabel kesejahteraan dalam melakukan analisa masalah dikaitkan dengan layanan yang dikelola kelembagaan yang ada di kelurahan.

Misalkan jumlah balita miskin dikaitkan dengan layanan posyandu, jumlah lansia miskin dikaitkan dengan layanan pos lansia, ketersediaan lahan bermain anak dan lain sebagainya.

Beberapa OPD tidak memiliki layanan langsung untuk rumah tangga miskin ataupun anggota rumah tangga secara langsung dalam intervensinya. Tetapi dalam implementasinya tetap bisa memberikan kontribusi percepatan penanggulangan kemiskinan, khususnya meminimalisir tingkat keparahan kemiskinan dan mencegah kerawanan munculnya warga miskin baru yang ditimbulkan karena lingkungan.

6.1.3 *Tingkat Presisi Data dengan Kondisi Kelurahan*

Pendalaman materi terkait dengan tingkat akurasi data, baik yang berbasis keluarga maupun data berbasis spasial telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Fasilitator Kelurahan dan ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan dari 28 Kelurahan. FGD ini untuk mengukur kekuatan dan kelemahan data, termasuk dari sisi metodologi penggalan data. Adapun hasil FGD sebagai berikut :

a. Data Berbasis Keluarga

No	Aspek	Kekuatan	Kelemahan	Solusi
1	Metodologi	Uji Publik yang dilakukan secara berjenjang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan warga miskin.		-
2	Tahapan Uji Publik	Proses uji publik secara umum mampu menyaring warga miskin, baik yang diusulkan dikeluarkan	- Warga miskin, tetapi karena tidak pernah aktif di kegiatan kampung sering tidak diusulkan.	- Penambahan metode rangking kesejahteraan - Ada penambahan uji publik

No	Aspek	Kekuatan	Kelemahan	Solusi
		maupun usulan baru.	- Masih terjadi ewuh pakewuh khususnya untuk mencoret nama penerima jamsos Nasional	tingkat RW dengan peserta perwakilan RT - Hasil uji publik di tingkat kelurahan dipasang di papan pengumuman RT untuk koreksi penyanggahan yang tidak tepat
3	Kepersetaan Uji Publik	Dari pengalaman peserta perempuan, laki-laki ataupun mix, tidak bisa digeneralisir. Tetap hasil akhir meyakini data presisi.	Peserta uji publik tingkat RT, ada yang masih belum melibatkan seluruh warga	- Kebijakan untuk menentukan peserta bisa ditetapkan oleh TPKK dengan melihat potensi di tiap wilayah - Agar optimal peserta uji publik, sebaiknya memanfaatkan rapat RT atau Rapat PKK
4	Hasil Akhir Data	- Data kemiskinan hasil uji publik secara umum sesuai dengan realitas lapangan. - Rumus Kategorisasi sesuai dengan kondisi keluarga miskin.	- Data Kemiskinan Nasional, sudah diusulkan untuk dikeluarkan (tidak layak, tidak ditemukan, tidak domisili, meninggal sebatang kara)	

No	Aspek	Kekuatan	Kelemahan	Solusi
			masih tercantum sebagai warga penerima jaminan nasional. - Penambahan data karena covid tahun 2021-2022 bersifat sementara karena PHK.	

b. Data Berbasis spasial

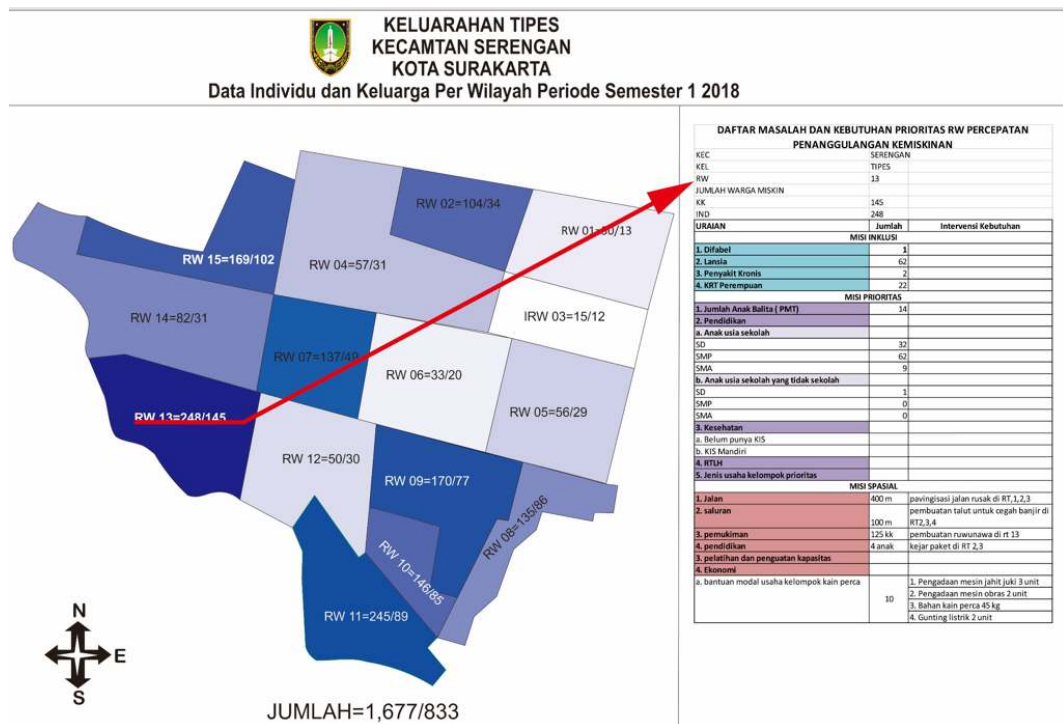
No	Aspek	Kekuatan	Kelemahan	Solusi
1	Metodologi	- Mampu memetakan persoalan secara detail - Memperkecil keinginan menjadi kebutuhan	Kesalahan penggunaan tools sosial mapping di AKP RW dan kesalahan informasi, menjadikan hasil pemetaan untuk usulan musrenbangkel	Review renstramas setiap tahun sebaiknya diterapkan, agar permasalahan yang belum teridentifikasi bisa masuk usulan pembangunan untuk tahun berikutnya
2	Tahapan PPA	Secara umum tahapan mulai dari RW yang kemudian dianalisa serta direkapitulasi menjadi long list masalah kelurahan sudah baik dan benar.	Dokumen hasil AKP RW seringkali tidak dimasukkan dalam lampiran renstramas. Pada saat digunakan untuk musling, panitia	Hasil AKP RW masuk dalam lampiran dokumen

No	Aspek	Kekuatan	Kelemahan	Solusi
			kebingungan mencari dokumennya	
3	Kebersetaan Uji Publik	Model Penggalan masalah dengan menganalisa hubungan sebab akibat masalah, dan peserta merupakan perwakilan RT yang memahami masalah tiap topik diskusinya lebih efektif dan menghasilkan data presisi.		
4	Hasil akhir Data	- Data relatif sesuai dengan kondisi lapangan (dampak analisa sebab akibat). - Urutan penyelesaian khususnya drainase dan jalan, mengurangi perebutan prioritas pada saat musrenbangkel. (Dampak dilakukan peruntutan setiap lokasi)	- Perencanaan yang dibuat kelurahan untuk penggunaan anggaran dana kelurahan belum mengacu renstramas - Data Ekonomi masyarakat masih dirasa lemah informasinya	- Dana Kelurahan sebaiknya diarahkan untuk RW prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan - DPK sebagian digunakan untuk RW prioritas dan fokus pengembangan ekonomi masyarakat
5	Kebijakan Tidak Boleh keluar dari	- Secara umum sepakat metode ini digunakan	Beberapa RW mengalami kesulitan	- Renstramas masih bisa dilakukan

No	Aspek	Kekuatan	Kelemahan	Solusi
	Renstramas dalam Musling	dengan pola 5 usulan berdasarkan renstramas & 1 usulan merupakan masalah baru di dalam musling. - Kebijakan Bappeda memasukkan Renstramas dalam Sistem SIPPD dirasa tepat, agar selalu konsisten dengan dokumen	karena masalah di renstramas sudah habis, hal ini karena kesalahan penggunaan metode & kesalahan informasi bahwa hasil akhir digunakan untuk 5 tahun.	perubahan, dengan model review pada saat musling, dan usulan baru bisa dipakai pada perencanaan tahun berikutnya. - Bappeda harus segera membuat mekanisme pelaporan review tiap tahunnya

6.2 STRATEGI PERENCANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN MODEL INTERVENSI

Fungsi lain dari TKPKD selain membangun sinergitas adalah perencanaan dan pengendalian program percepatan penanggulangan kemiskinan, agar tepat sasaran dan tepat program. Data berbasis Keluarga yang tersedia dalam berbagai fitur di sistem Informasi Kesejahteraan bisa menjadi landasan dasar untuk menganalisa dan mendiagnosa kemiskinan untuk menentukan strategi implementasinya.



Gambar 6.2 : Penggunaan dokumen Berbasis keluarga dan spasial dalam perencanaan intervensi pada RW Prioritas (Lokasi terdampak).

Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, tentunya tidak bisa dilakukan secara serentak. Pengendalian program dan pengukuran dampak program akan mudah dilakukan monitoring perkembangan kemiskinan bila dilakukan dengan penetapan sasaran intervensi baik dengan pendekatan lokasi terdampak dan target sasaran prioritas. Dengan basis data keluarga sejahtera, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, adapun beberapa pendekatan yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Kantong Kemiskinan atau lokasi terdampak

Fitur di sistem informasi kesejahteraan sudah tersedia untuk menentukan kantong-kantong kemiskinan kota Surakarta baik di level kecamatan, Kelurahan, RW dan RT. Pendekatan RW kantong kemiskinan di setiap kelurahan, akan mempermudah merencanakan kebutuhan intervensi baik dari sisi Rumah Tangga maupun individu keluarga miskin dengan melihat variabel kemiskinan pada lokasi terdampak. Perencanaan

kebutuhan, akan mampu menghitung perkiraan kebutuhan anggaran, peran masing-masing OPD, serta perkiraan penurunan angka kemiskinan yang akan dicapai dengan memperhatikan variabel kesejahteraan khususnya yang memiliki bobot utama (23 variabel). Pendekatan kantong kemiskinan akan bisa didukung dengan tambahan informasi yang terkait dengan persoalan spasial/lingkungan yang bisa dilakukan secara sinergis di lokasi terdampak yang akan menjadi sasaran.

b. Pendekatan pada Kelompok Inklusi

Beban keluarga miskin akan semakin berat apabila memiliki persoalan yang terkait dengan kemampuan livelihood keluarga dan beban tanggungan pada anggota Rumah tangga yang membutuhkan akses lebih untuk mendapatkan layanan dasar, kelompok ini disebut kelompok inklusi.

Adapun kelompok miskin yang bisa dikategorisasikan pada kelompok inklusi adalah sebagai berikut :

- Rumah Tangga dengan Kepala keluarga Perempuan.
- Kepala Keluarga yang disabilitas dan atau memiliki anggota rumah tangga disabilitas.
- Kepala Keluarga yang punya penyakit kronis dan atau memiliki anggota rumah tangga memiliki penyakit kronis.
- Kepala Keluarga yang sudah lansia dan atau memiliki anggota rumah tangga lansia.

Dalam fitur sistem informasi kesejahteraan data tersebut diatas bisa dilakukan dengan pengolahan di variabel kemiskinan, olah query RTS maupun olah query ART.

c. Pendekatan pada kelompok Prioritas

Kelompok prioritas adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Adapun kelompok prioritas adalah sebagai berikut :

- Anak usia sekolah tidak sekolah

- Anak usia sekolah
- Rumah tangga miskin yang belum memiliki layanan jaminan kesehatan
- Rumah tangga miskin yang sudah memiliki jaminan kesehatan mandiri, untuk dipindah ke JKN-PBI.
- Rumah Tangga miskin dengan Rumah Tidak Layak Huni.
- Rumah tangga miskin yang memiliki kegiatan ekonomi produktif.

6.3 STRATEGI KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

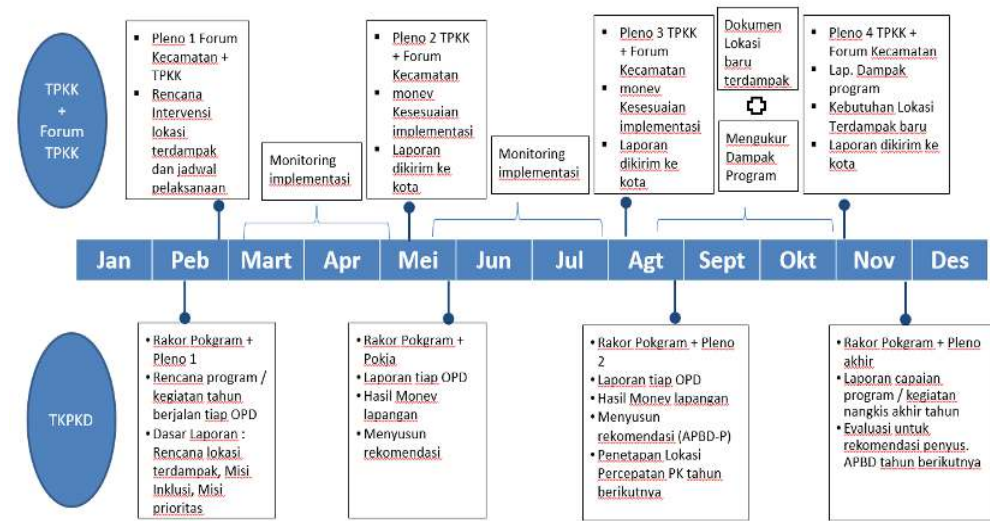
Fungsi paling vital yang harus dijalankan TKPKD adalah membangun koordinasi dan pengendalian program, mulai dari penetapan lokasi terdampak, Perencanaan dan penganggaran intervensi, pembagian peran antar OPD, dan mengukur dampak intervensi atau monitoring dan evaluasi atas hasil intervensi. Optimalisasi peran antara TKPKD, TPKK dan Forum TPKK Kecamatan dalam sebuah relasi untuk monitoring dan pengendalian program masih belum ada arah yang jelas dalam membangun strategi komunikasi.

Hasil evaluasi dengan Bappeda selaku sekretaris TKPKD, rapat koordinasi Tri Wulan dengan model Pleno seluruh anggota TKPKD dirasa tidak efektif, beberapa hal yang mempengaruhinya adalah :

- Utusan OPD yang berangkat belum tentu pengambil kebijakan, sehingga tidak bisa memberikan input arah strategi kontribusi tiap OPD dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Laporan capaian tiap OPD lebih menggambarkan capaian program OPD, belum mampu memberikan gambaran berapa prosentase anggaran yang digunakan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan atau menggambarkan berapa orang warga miskin yang terdampak tidak langsung atas pembangunan.

- Tidak mampu menyusun rekomendasi untuk setiap langkah perbaikan atas intervensi yang dilakukan, karena minimnya informasi atas dampak yang terjadi pasca intervensi.
- TPKK tidak pernah tahu program intervensi OPD yang masuk ke kelurahan, sehingga tidak mampu melakukan monitoring dan evaluasi atas intervensi penanggulangan kemiskinan.
- Penetapan RW modeling dan identifikasi kebutuhan intervensi yang ditetapkan pada pertengahan tahun, hal ini berdampak pada ketidakjelasan anggaran intervensi pada RW yang telah ditetapkan. Persoalan ini dipengaruhi tidak terintegrasinya lokasi terdampak dengan sistem perencanaan pembangunan, sehingga banyak OPD kesulitan mengalokasikan anggaran pada anggaran perubahan.

Terkait dengan berbagai permasalahan diatas, maka dibutuhkan model koordinasi dan strategi pengendalian program agar agenda strategis percepatan penanggulangan kemiskinan bisa dijalankan dengan baik. Keanggotaan TKPKD dan TPKK adalah seluruh pemangku pembangunan di kota Surakarta, maka dalam implementasinya mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program semuanya harus terlibat dalam pembahasannya. Tentunya masing-masing stake holder akan menjalankan fungsinya berdasarkan level dan ruang lingkup tanggung jawabnya masing-masing.



Gambar 6.3 : Tahapan Koordinasi TPKK, Forum TPKK Kecamatan dan TKPKD

Dalam setiap tahapan rapat koordinasi secara waktu akan beriringan antara rapat Koordinasi yang diselenggarakan di tingkat kota, Kelurahan maupun kecamatan. Dengan Pola seperti gambar diatas, ketepatan sasaran dan ketepatan program akan didasarkan pada hasil perencanaan TPKK pada lokasi terdampak, dan implementasi intervensi program akan dilaksanakan oleh OPD, CSR dan stake holder yang lain.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi program penanggulangan kemiskinan, akan bisa dilakukan oleh tim kelurahan dan akan menjadi bahan di rapat koordinasi di rakor TKPKD. Fungsi sekretariat TKPKD akan menyiapkan seluruh bahan evaluasi kelurahan dan menjadi rakor pembahasan di kelompok program di tingkat kota.

6.4 STRATEGI MENGUKUR PENCAPAIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN SECARA PERIODIK

Sistem Informasi Kesejahteraan yang dibangun oleh pemerintah kota surakarta, selain digunakan sebagai base line perencanaan, juga bisa difungsikan sebagai alat monitoring perkembangan kemiskinan. Kebutuhan data Realtime akan memperkecil tingkat kesalahan intervensi baik dalam menentukan target sasaran maupun program intervensi. Selain itu, data berbasis spasial, sudah diatur untuk mengetahui tingkat perubahan yang terjadi dalam upaya daya dukung lingkungan mengurangi tingkat kerawanan munculnya warga miskin baru.. Adapun strategi untuk mengukur pencapaian program penanggulangan kemiskinan secara periodik dengan cara :

A. Sistem Informasi Kesejahteraan/Data Berbasis keluarga

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atas upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi resiko tingkat kesalahan dalam menentukan sasaran serta layanan program, dibutuhkan perkembangan data kemiskinan secara realtime. Bussines data di dalam sistem informasi kesejahteraan sudah di desain sedemikian rupa untuk menghasilkan data realtime. Adapun gambaran bussines data SIK adalah sebagai berikut :

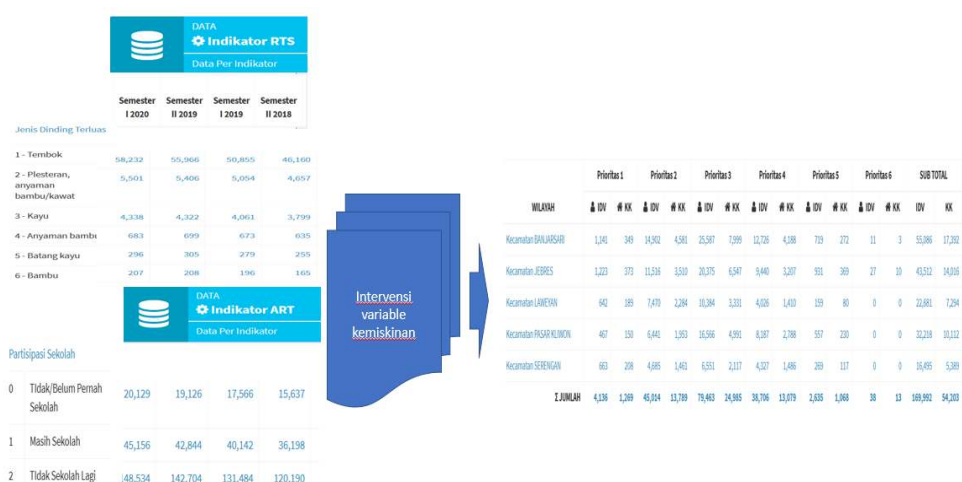
a. *Perubahan Indikator kemiskinan setiap semester*

Recording perubahan indikator kemiskinan dilakukan setiap semester, strategi menghasilkan data realtime adalah setiap keluarga miskin yang sudah dilakukan intervensi baik variable RTS maupun ART saat itu juga dirubah, maka jumlah masalah pada semester berikutnya akan berkurang. Fitur ini bisa digunakan sebagai alat penilaian peran setiap OPD dalam memberikan kontribusi percepatan penanggulangan kemiskinan dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama OPD.

b. *Perubahan Tingkat Kesejahteraan*

Recording perubahan tingkat kesejahteraan keluarga miskin di lakukan setiap semester, perubahan variabel kemiskinan yang dilakukan akan secara otomatis menggeser tingkat kesejahteraan. Karena di dalam

fitur ini sudah dimasukkan rumus penilaian kategorisasi kesejahteraan. Desain ini akan mempermudah TKPKD dalam mengukur tingkat keberhasilan program, sekaligus memantau perubahan kantong-kantong kemiskinan di setiap wilayah.



Gambar 6.4 : Bussines data SIK, pengaruh variabel kemiskinan dan tingkat kesejahteraan

c. Jumlah Penerima Manfaat

Recording penerima manfaat bisa dilihat di dalam fitur program bantuan setiap RTS maupun ART, sehingga akan mudah untuk melihat jenis layanan inervensi program yang sudah diterima sekaligus untuk memantau jumlah penerima layanan.

d. Problematika Tata Kelola Data Kesejahteraan

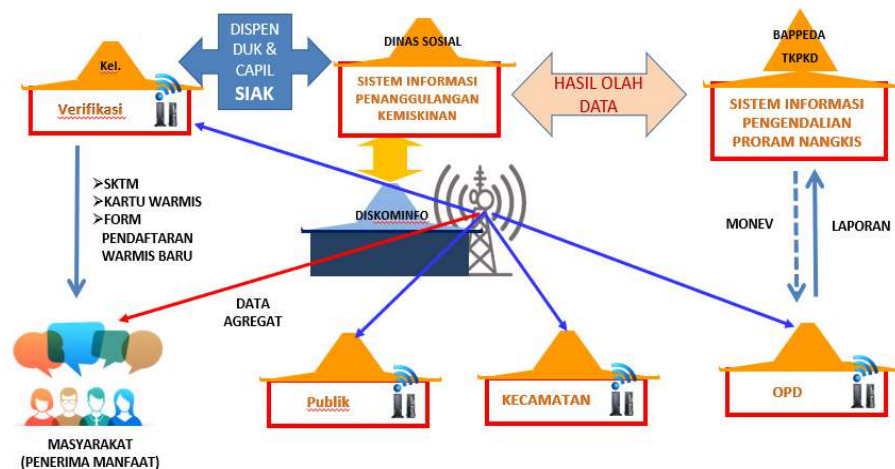
Sistem Informasi data kesejahteraan yang dibangun pemerintah kota Surakarta, seharusnya mampu menjadi sebuah single data kemiskinan baik sebagai basis perencanaan, strategi pengendalian program dalam penetapan target penurunan kemiskinan, sebagai data sinergitas antar stake holder yang akan diatur dalam sebuah rapat koordinasi lintas stake holder. Beberapa problem mendasar potensi sistem informasi kesejahteraan belum bisa digunakan secara maksimal, baik dalam perencanaan maupun sebagai alat monitoring dan pengendalian adalah sebagai berikut :

- *Data kemiskinan Sebagai basis Perencanaan*

Sistem Informasi kesejahteraan dikelola oleh Kelompok Kerja (Pokja) Data yang berada dibawah sekretaris TKPKD dalam hal ini BAPPEDA. Adapun anggota pokja data meliputi :

- Dinas Sosial, bertanggung jawab atas proses-proses pembaharuan data kemiskinan yang ada di sistem Informasi Kesejahteraan.
- Diskominfo, bertanggungjawab atas maintenance aplikasi dan pengelolaan server.
- Dispendukcapil, mengintegrasikan data di sistem informasi kesejahteraan dengan data kependudukan.
- Bappeda sebagai sekretaris TKPKD, bertanggung jawab dalam pengendalian data baik untuk menyusun perencanaan, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dan melakukan monitoring capaiannya.
- Badan Pusat Statistik, bertanggung jawab melakukan bimbingan teknis atas tata kelola data kesejahteraan atau sebagai wali data.

Dalam menjalankan fungsinya, Pokja data TKPKD Kota Surakarta dibantu oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK) khususnya pokja data yang akan menjalankan fungsi pembaharuan data di lapangan.



Gambar 6.5 : Desain tata kelola data sistem informasi kesejahteraan berbasis web.

Dalam kerangka desain tata kelola data, peran Bappeda selaku sekretaris TKPKD belum optimal menggunakan data yang ada di sistem informasi kesejahteraan sebagai basis dalam perencanaan untuk menentukan target penanggulangan kemiskinan maupun strategi implementasi dengan membangun sinergitas antar stake holder.

➤ *Data Kemiskinan sebagai basis Monitoring dan Pengendalian Program*

Untuk mengukur keberhasilan program, sistem informasi kesejahteraan bisa dijadikan alat ukur untuk menganalisa tingkat capaian penanggulangan kemiskinan secara realtime. Dalam kerangka desain tata kelola data, hal itu belum bisa dilakukan karena beberapa hal, diantaranya :

- Pasca intervensi program yang dilakukan oleh OPD, baik pada target sasaran RTS maupun ART, belum dilakukan proses perubahan data di variabel kemiskinannya. Sehingga tampilan fitur, tidak ada perubahan. Dengan sistem recording yang dilakukan tiap semester, maka seolah-olah tidak ada intervensi

apapun yang dilakukan setiap OPD pada keluarga miskin dilihat dari variabel kemiskinan. Karena tidak ada perubahan data, maka rekapitulasi masalah variabel kemiskinan tidak terjadi penurunan bahkan meningkat, karena data yang diolah akan mengambil data semester sebelumnya dan data variable dari tambahan warga miskin.

- Tidak adanya perubahan pada variabel kemiskinan, berpengaruh langsung pada fitur untuk penentuan tingkat kesejahteraan di dashboard bagian depan dalam aplikasi. Data ini kemudian tidak bisa dijadikan alat monitoring, karena tidak ada pergeseran status kesejahteraan setiap semester bahkan bertambah karena adanya usulan baru tiap semesternya.
- Dampak lain dari tidak berubahnya variabel kemiskinan, data tidak bisa lagi valid dengan situasi lapangan terkait dengan kebutuhan warga miskin baik dari sisi tingkat kesejahteraan maupun kebutuhan intervensinya.

B. Data Berbasis Spasial atau Lingkungan

Adapun alat untuk melakukan monitoring ketepatan sasaran dan ketepatan program dari data berbasis spasial atau lingkungan untuk mengurangi kerawanan munculnya warga miskin baru adalah sebagai berikut :

- a. Sistem monitoring yang dilakukan oleh TPKK pada saat melakukan monev pada lokasi-lokasi prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan yang akan dilaporkan per-triwulan kepada TKPKD.
- b. Sistem monitoring untuk melihat kontribusi OPD pada proses-proses percepatan penanggulangan kemiskinan, dilakukan pada saat MUSRENBANGKEL. Dimana ketika musyawarah lingkungan (MUSLING) dilakukan identifikasi permasalahan renstramas di masing-masing RW, yang sudah diselesaikan baik oleh OPD, Swadaya Masyarakat maupun stake holder yang lain.

DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2016 – 2017
RW KELURAHAN

No	Kegiatan	Pelaksana	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Anggaran	Tahun Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							2016/2017 *

Gambar 6.6 : Contoh Format Identifikasi masalah renstramas yang sudah diselesaikan.

- c. Problematika data berbasis spasial atau lingkungan, masih ditemukan beberapa RW yang melakukan kesalahan pada saat melakukan pemetaan awal. Dimana proses social mapping hanya mengidentifikasi masalah-masalah penting saja yang akan diusulkan di musrenbangkel tahun berjalan. Hal ini berdampak, ketika kebijakan musling usulan tidak boleh keluar dari renstramas dan usulan program sudah diintervensi, maka RW yang bersangkutan sudah tidak bisa mengusulkan lagi karena secara dokumen sudah selesai semua permasalahannya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 KESIMPULAN

Kajian Strategi Percepatan Penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan Data berbasis Keluarga dan Spasial di Kelurahan di susun sebagai bahan menyusun perbaikan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. Adapun kesimpulan dari kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari kondisi makro, tingkat kemiskinan di Kota Surakarta sejak tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 10,89 dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 8,7 % atau terjadi penurunan sebesar 2,19 % atau rata-rata penurunan tiap tahun sebesar 0,44 %. Tetapi pada tahun 2020 naik menjadi 9,03 % dan tahun 2021 prosentase kemiskinan meningkat menjadi sebesar 9,4 % hal ini dipengaruhi kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kinerja capaian pada tahun 2022 angka kemiskinan turun menjadi 8,84% atau turun 0,56%.
 - Mencermati trend penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun pencapaian tertinggi penurunan prosentase kemiskinan terjadi tahun 2018 yaitu sebesar 1,57% atau sebesar 8,7% dibandingkan tahun 2017 sebesar 10,65%. Hal ini dipengaruhi oleh strategi penanggulangan kemiskinan pada tahun 2017 dengan menyasar kelurahan kantong kemiskinan yaitu Mojosongo, Pajang, Kadipiro, Tipes, Semanggi dan tahun 2018 pada RW Kantong kemiskinan di tiap kelurahan.
 - Pada tahun 2019 trendnya menurun lagi menjadi di 0,38% dibawah 1% dengan prosentase kemiskinan menjadi 8,7%. Hal ini dipengaruhi tidak berjalannya RW modeling, karena masa transisi pemindahan tanggung jawab pengelolaan SIK dari Bappeda ke Dinas Sosial dan

disusul dengan pandemic covid 19 dimana alokasi anggaran APBD lebih banyak fokus untuk penanganan pandemic.

- Mencermati capaian penanggulangan kemiskinan tahun 2022 meskipun turun menjadi 8,84%, tetapi indek kedalaman (P1) atau ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih tinggi di 1,07% dan nomer 2 dari kota-kota di Jawa Tengah. Artinya ketepatan sasaran dan ketepatan program penanggulangan kemiskinan masih belum menysasar sepenuhnya pada kelompok-kelompok miskin. Semakin tinggi P1 terhadap garis kemiskinan, maka akan semakin sulit untuk mengentaskan warga miskin dari kemiskinannya.
- 2. Kebijakan pemerintah kota Surakarta sudah tepat dengan melakukan pengembangan Data Kemiskinan lokal diluar data yang dikeluarkan olah pemerintah Nasional. Kebijakan ini bisa mengurangi tingkat kekeliruan data yang dikeluarkan pemerintah pusat dan upaya ini akan mengurangi tingkat keparahan keluarga miskin dari keterpurukan. Selain itu, dengan pengembangan data kemiskinan lokal, pemerintah daerah memperluas cakupan penerima manfaat baik pada kelompok miskin yang belum terdata maupun kelompok rentan sosial ekonomi. Kebijakan ini akan mampu memperkecil kelompok-kelompok rentan bergeser menjadi miskin, ketika ada kejadian yang luar biasa misalnya seperti wabah atau kenaikan BBM.
- 3. Proses penyisiran warga miskin dengan metologi AKP berbasis keluarga, mulai dari proses uji publik di tingkat RT, Musrenbang data di tingkat Kelurahan mampu melakukan penyisiran data untuk menentukan usulan siapa yang miskin dan tidak miskin berdasarkan dari pengamatan masyarakat memotret keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hasil musrenbang data belum merupakan hasil final, tetapi masih menjadi daftar rumah tangga miskin sementara. Pokja Data TPKK akan menindaklanjuti dengan home visit dari setiap usulan, untuk menginput variabel-variabel kemiskinan dan aplikasi SIK akan mengolah

kategorisasi kesejahteraan secara otomatis terbagi kedalam tingkat keparahan kemiskinan (P1-P6) berdasarkan rumus kategorisasi. Proses berjenjang ini menghasilkan data yang presisi dengan lapangan.

4. Data berbasis keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Kesejahteraan (e-sik) bisa digunakan sebagai acuan dalam menyusun analisis kemiskinan; diagnosis kemiskinan; dan menyusun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan; sekaligus bisa digunakan sebagai alat monitoring keberhasilan program. Dengan fitur-fitur di aplikasi sistem informasi kesejahteraan yang telah disediakan baik dari sebaran kemiskinan (kantong kemiskinan) variabel kebutuhan intervensi baik dari sisi RTS dan ART akan mempermudah pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan. Dibutuhkan upaya-upaya strategis agar data yang dikelola dalam SIK bisa terus realtime dengan kondisi yang ada di lapangan, diantaranya adalah :

- a) Perlu melakukan perubahan indikator kemiskinan, pasca intervensi dilakukan.
- b) Sampai saat ini belum dilakukan perubahan variabel tersebut, sehingga sistem recording akan mengambil data pada semester sebelumnya. Dampak tidak dirubahnya variabel kemiskinan adalah:
 - Tidak mampu memonitoring perubahan kesejahteraan setiap keluarga miskin.
 - Tidak mampu mengidentifikasi peran setiap OPD dalam proses-proses penanggulangan kemiskinan, dimana tidak berubahnya variabel kemiskinan “*seolah-olah*” tidak ada upaya intervensi OPD.
- c) Aplikasi SIK sudah berbasis web, untuk menghasilkan data realtime seharusnya sudah bisa dijalankan, khususnya perubahan variabel kemiskinan data yang dilakukan proses intervensi oleh OPD.
- d) Metodologi Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) berbasis keluarga, melalui uji publik berjenjang diyakini oleh Tim penanggulangan Kemiskinan kelurahan menghasilkan data yang sesuai lapangan. Problematika yang sering muncul justru adalah data yang

dikeluarkan dari Nasional, dimana nama-nama keluarga miskin yang sudah diusulkan untuk keluar (tidak layak, meninggal sebatang kara, tidak ditemukan dan tidak domisili) masih menerima bantuan jaminan sosial dari pemerintah pusat.

5. Data berbasis Spasial atau Lingkungan, sudah di integrasikan dengan sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sehingga akan menjadi landasan dasar proses musrenbang partisipatif sejak mulai dari Musyawarah lingkungan. Metodologi Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) berbasis spasial, mampu mengurangi keinginan kelompok masyarakat tertentu, menjadi kebutuhan masyarakat berbasis masalah di lingkungan masing-masing. Kebijakan yang diatur dalam Perwali Nomor : 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan musrenbang Kota Surakarta, dimana mengatur usulan kegiatan harus mengacu pada dokumen RENSTRAMAS Kelurahan akan mendorong terus masyarakat memperbaiki dokumen berbasis spasial. Beberapa kelemahan RENSTRAMAS perlu pengaturan lebih lanjut terkait dengan kesalahan penggunaan metodologi di AKP tingkat RW dan munculnya permasalahan baru pasca social mapping di tingkat RW.
6. Dari kesimpulan nomer 4 dan 5, dokumen berbasis keluarga dan berbasis spasial/lingkungan bisa dijadikan rujukan data untuk merencanakan proses-proses intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan, baik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan warga miskin sekaligus sebagai upaya mengurangi kerentanan munculnya warga baru karena lingkungan yang tidak mendukung.
7. RW modeling atau RW prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan yang disusun sejak tahun 2021, sebagai salah satu strategi pendekatan intervensi, sudah konsisten menggunakan data berbasis keluarga dan berbasis spasial sebagai dasar perencanaan oleh TPKK. Problematika yang muncul adalah tidak ada jaminan penganggaran intervensi atas perencanaan yang dilakukan TPKK. Tidak adanya kepastian anggaran

untuk intervensi pada RW prioritas berdampak pada mekanisme koordinasi kelembagaan yang berjenjang, diantaranya adalah :

- a) TPKK tidak memiliki data intervensi OPD yang akan berjalan di RW prioritas, sehingga pokja pengaduan masyarakat dan pokja kemitraan tidak bisa melakukan monitoring serta mengukur dampak intervensinya.
- b) Forum TPKK Kecamatan tidak bisa optimal dalam menjalankan fungsinya, untuk melaporkan intervensi beserta dampaknya kepada TKPKD.
- c) Sekretariat TKPKD tidak mampu melaporkan intervensi masing-masing OPD beserta dampak perubahan kesejahteraan masyarakat miskin baik yang bersumber dari data berbasis keluarga maupun data berbasis spasial. Tidak adanya perubahan data variable kemiskinan dalam aplikasi SIK serta tidak adanya laporan dari TPKK, berdampak pada kelemahan pelaporan intervensi baik dengan strategi RW prioritas maupun laporan di tingkat kota terkait dengan hak atas pendidikan, kesehatan, permukiman dan ketahanan pangan.

7.2 REKOMENDASI

Beberapa hal yang bersifat rekomendasi atas optimalisasi data berbasis keluarga dan berbasis spasial di kelurahan sebagai basis data perencanaan, Integrasi antar Stake holder, pengendalian program dan monitoring serta evaluasi atas pencapaian program yaitu :

1. Penyelerasan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Musrenbang.
2. Strategi pendekatan implementasi penanggulangan kemiskinan dengan beberapa model diantara, :
 - a. Melalui strategi RW prioritas percepatan penanggulangan Kemiskinan di tiap kelurahan, adapun jumlah RW yang akan menjadi prioritas bisa dengan cara proporsional antara jumlah warga miskin dengan jumlah RW di tiap kelurahan.

- b. Melalui strategi penetapan target penurunan setiap variabel kemiskinan, khususnya variabel yang memiliki bobot utama (39 variabel) baik hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ketahanan pangan dan permukiman se-Kota Surakarta.
3. Mempertegas pembagian peran anggota Kelompok Kerja (POKJA) Data TKPKD khususnya antara Dinas sosial dan Bappeda selaku sekretaris TKPKD. Adapun rekomendasinya adalah Dinas sosial memiliki peran atas ketersediaan data, baik dari sisi pelaksanaan pembaharuan data kemiskinan tiap 2 tahun, pendaftaran warga miskin baru, verifikasi dan pembaharuan variabel kemiskinan sehingga mampu menghasilkan data realtime. Adapun peran Bappeda adalah pengendalian data kemiskinan yang dikelola dalam SIK sebagai basis perencanaan untuk menetapkan target-target penanggulangan kemiskinan termasuk didalamnya penganggarannya dan monitoring implementasi program-program yang dijalankan OPD disesuaikan antara variable kemiskinan dengan IKU OPD.
4. Sistem informasi kesejahteraan agar bisa dijadikan rujukan perencanaan setiap OPD, maka setiap OPD memiliki hak akses untuk membaca seluruh data yang ada di SIK untuk mendukung indikator kinerja Utama (IKU) setiap organisasi. Untuk meningkatkan kapasitas OPD dalam menganalisa dan mendiagnosa data kesejahteraan dibutuhkan penguatan kapasitas setiap OPD agar bisa menentukan sasaran dan program sesuai kebutuhan warga miskin.
5. Melakukan revisi atas perwali Perwali Nomor : 13 tahun 2019 tentang tata kelola data kemiskinan untuk menambah pasal tentang hak akses dan hak merubah indikator kemiskinan atas SIK
6. Melakukan revisi Perwali Nomor : 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan musrenbang Kota Surakarta, dimana perlu kalusuk yang menambahkan tentang mekanisme review renstramas, agar data semakin presisi dengan kondisi lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Mely G. Tan dan Selo Sumarjan [Penyunting]. (1980). *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Cahyat, Ade dan Moira Moeliono. (2005). Pengarusutamana Kemiskinan: Apa Mengapa dan Bagaimana? *Governance Brief CIFOR (Center for Internatonal Forestry Research)*, Desember, Nomor 25, hal.1-5.
- Pradhanawati, Ari. (2008). "Teori Kemiskinan", *Supplement* Mata Kuliah Sosiologi Pembangunan Program Doktor Ilmu Ekonomi UNDIP Semarang.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho D. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Salim, Emil. (1976a). *Perencanaan Pembangunan dan Perataan Pembangunan* [Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ekonomi Perencanaan FE-UI, 14 Februari]. Jakarta: Lembaga Penerbut FE-UI.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Edisi Pertama, Cetakan. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2007). *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Jakarta: Lembaga Penerbut FE-UI.
- Suryawati, Chriswadani. (2005). Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. *JMPK*, September, Vol.08, No.03, hal. 121-129.

Tim Crescent. (2003). *Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015 . Pemerintah Kota Surakarta

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021 . Pemerintah Kota Surakarta

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Surakarta Tahun 2022 – 2026 . Pemerintah Kota Surakarta

Laporan Perkembangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Surakarta tahun 2013. Pemerintah Kota Surakarta

Laporan Perkembangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Surakarta tahun 2014. Pemerintah Kota Surakarta

Laporan Perkembangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Surakarta tahun 2015. Pemerintah Kota Surakarta

Laporan Perkembangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Surakarta tahun 2022. Pemerintah Kota Surakarta

Kota Surakarta dalam angka tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS)

Kota Surakarta dalam angka tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS)

Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022. Badan Pusat Statistik (BPS)

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022